



EDUKASI KONSUMEN

EDISI SEPTEMBER 2024

sikapiuangmu.ojk.go.id



**OJK Tingkatkan Literasi
Keuangan Masyarakat**

YUK, BELAJAR SERU DI LMSKU!

Kumpulkan **Poin** Pembelajaran dan Dapatkan **Merchandise** Menarik



LMSKU OJK (Learning Management System Edukasi Keuangan OJK) merupakan platform pembelajaran yang mandiri dan terintegrasi terkait literasi keuangan yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja secara gratis.

CARA MENGAkses LMSKU

1. Buka browser dan kunjungi <https://lmsku.ojk.go.id>
2. Registrasi akun dengan kode *referral*
3. Klik tautan aktivasi akun via *e-mail*
4. Masuk ke LMSKU
5. Akses modul pembelajaran
6. Tukarkan poinmu dengan *merchandise*

Tutorial lebih lengkap:

<https://linktr.ee/LMSkuOJK>



5 Kabar Otoritas

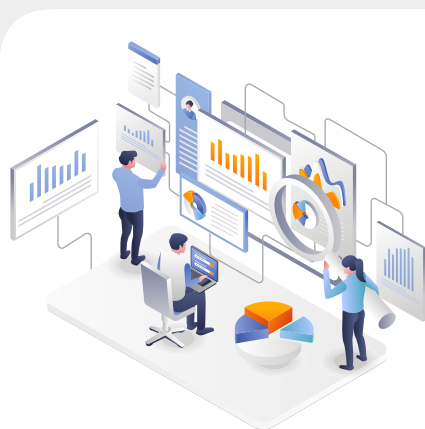
OJK Gelar Edukasi Keuangan Pelajar lewat GENCARKAN 2024

- 20 Edu Perbankan
Bahaya Tindakan Ilegal Jual Beli Rekening
- 22 Edu Invest
Atasi Inflasi dengan Investasi Obligasi FR
- 24 Edu IKNB
OJK Rilis Peta Jalan untuk Perkuat Industri Dana Pensiun
- 26 Edu Syariah
ISFO 2024 Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat
- 28 Edu Tech
Waspada Maraknya Modus Penipuan Digital
- 32 Sosok
Royke Tumilaar, Direktur Utama BNI BNI Dukung Program Literasi Keuangan OJK
- 34 Regulasi
OJK Terbitkan POJK Baru tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi
- 36 Bisnis Pemula
Franchise Salah Satu Pilihan Bisnis Untuk Pemula
- 38 Investasi
Fears and Greed Hindari Bias Psikologi Dalam Berinvestasi
- 40 Konsumen Bicara
Aduan Konsumen Modus Investasi Bodong dan Judi *Online*
- 41 Telaah Produk
Raih Berkah Wakaf Melalui *Cash Waqf Linked Deposit*
- 43 Angka Bicara
Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024
- 44 Inspirasi
OJK Genjot Inklusi Keuangan Lewat Program Satu Rekening Satu Disabilitas
- 46 Wacana
Untung Rugi Kenaikan Limit Pinjol Jadi Rp10 Miliar
- 48 Literasi Keuanganpedia
Buku Saku Perempuan Cerdas Keuangan
- 49 Kuis Sikapi Uangmu
- 50 Silam Kini
Tradisi Menabung dari Masa Ke Masa

10 Sorotan Utama II

Bedah Parameter Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan penduduk Indonesia sebagai landasan program peningkatan literasi dan inklusi keuangan ke depan, telah memberikan hasil. Hasil SNLIK, yakni indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%. Lantas bagaimana parameter dan karakteristik perhitungan indeks literasi dan inklusi keuangan SNLIK 2024?



18 Perspektif

Waspada Judi *Online* dan Dampak Bagi Negara

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mencatat kerugian negara mencapai USD 7-9 miliar atau sekitar Rp107-138 triliun per tahun (kurs Rp15.335 per dolar AS) akibat judi *online*. Padahal dana sebesar itu dapat dimanfaatkan untuk pendanaan investasi dan modal UMKM. Yuk, cegah judi *online* dan cari alternatif investasi yang aman.

6 Sorotan Utama I

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyelenggaraan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2023 yang digelar di semua provinsi mulai Januari hingga Februari 2024. Kerja sama OJK dan BPS pada pelaksanaan SNLIK 2024 ini diharapkan dapat memastikan proses persiapan, pendataan, hingga penghitungan hasil survei lebih terjaga kualitas dan akurasi sehingga indeks yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia terkini.

14 Sorotan Utama III

OJK Tingkatkan Literasi Keuangan Melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan

Mengapa literasi keuangan begitu penting? Jawabannya jelas, semakin tinggi tingkat literasi keuangan masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan. Imbasnya, melekatkan literasi keuangan akan menggerakkan perekonomian negara.



30 Fokus Global

Dinginnya Serangan Fenomena *Tech Winter* pada Ekosistem Teknologi

Sadarkah kita sejak akhir 2022 silam banyak perusahaan berbasis teknologi, terutama *startup*, gulung tikar? Kondisi tersebut masih berlangsung hingga kini. Konon disebabkan karena fenomena *tech winter*. Lalu apa itu *tech winter*?

SNLIK dan Kesejahteraan Masyarakat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) mengadakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024, Survei yang diselenggarakan di seluruh Indonesia pada Januari-Februari 2024 ini punya tiga tujuan. Pertama, untuk mengetahui tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Kedua, sebagai evaluasi terhadap efektivitas program literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Dan ketiga, sebagai bahan perencanaan program kegiatan literasi dan inklusi pada tahun berikutnya.

Literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan. Adapun inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses pemanfaatan atas produk dan layanan pelaku usaha sektor keuangan yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat. Keduanya sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Substansi SNLIK mengukur lima hal, yakni pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan. Dari survei ini kita bisa melihat pemahaman masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan dan merancang langkah ke depan yang harus dilakukan.

Dengan bekerja sama dengan BPS, OJK berharap dapat memastikan proses persiapan, pendataan, hingga penghitungan hasil survei lebih terjaga kualitas dan akurasi. Indeks yang diperoleh pun dapat menggambarkan kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia terkini.

Gambaran akurat dan terkini mengenai kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat ini sangat penting agar OJK dapat menyusun kebijakan yang sesuai dengan realita dan kebutuhan masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) mengatur target inklusi keuangan Indonesia harus mencapai 90% pada 2024. Untuk mencapai target ini OJK melakukan edukasi dan literasi keuangan bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, pembayaran, dan lain-lain. OJK juga bersama Pemerintah Daerah menyusun dan menjalankan program inklusi keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Seluruh rangkaian program ini bertujuan untuk membangun masyarakat Indonesia yang terliterasi, teredukasi, dan juga terlindungi.

Dengan suksesnya literasi dan tercapainya inklusi keuangan, kita berharap kesejahteraan masyarakat dapat terwujud lebih cepat dan berkelanjutan.

SUSUNAN REDAKSI

DEWAN PELINDUNG:

Mahendra Siregar
(Ketua Dewan Komisiner OJK)

DEWAN PENASEHAT:

Friderica Widyasari Dewi (Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen), Rizal Ramadhani (Deputi Komisiner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen)

PEMIMPIN UMUM /PEMIMPIN REDAKSI:

Mohammad Ismail Riyadi (Kepala Grup Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah selaku Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi), Rudy Agus P. Raharjo (Kepala Departemen Pelindungan Konsumen)

REDAKTUR AHLI:

Horas V.M. Tarihoran (Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan), Edwin Nurhadi (Direktur Inklusi Keuangan), Sekar Putih Djarot (Plt. Kepala Grup Komunikasi Publik); Sabar Wahyono (Direktur Pelayanan Konsumen, Pemeriksaan Pengaduan dan EPK Regional), Tri Herdianto (Direktur Pembelaan Hukum Pelindungan Konsumen), Rela Ginting (Direktur Penelitian Kebijakan dan Pengaturan EPK)

REDAKTUR:

Cecep Setiawan (Plt. Deputi Direktur Perencanaan, Pengembangan, Evaluasi Literasi dan Edukasi Keuangan)

REDAKSI:

Anggota Tim Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan

ALAMAT REDAKSI:

Bidang Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Menara Radius Prawiro Lantai 2, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta Pusat 10350
Telepon: (021) 29600000
Faksimili: (021) 3866032
Website: www.ojk.go.id.

Majalah Edukasi Konsumen dapat diunduh pada minisite OJK: sikapiuangmu.ojk.go.id

OJK Gelar Kampanye Menabung Lewat GENCARKAN 2024

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mencanangkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) dalam rangka mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan secara masif dan merata di seluruh Indonesia.

Pencanangan GENCARKAN dengan tema “Masyarakat Cerdas Keuangan Menuju Indonesia Emas 2045” dilaksanakan bersamaan dengan peringatan Hari Indonesia Menabung (HIM) tahun 2024. Perhelatan ini digelar di JiExpo Kemayoran, Jakarta, 22 Agustus 2024, dan dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, jajaran Dewan Komisiner OJK, Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia, serta Pimpinan dan Asosiasi Industri Jasa Keuangan. Selain itu, kegiatan pencanangan juga diikuti oleh lebih dari 1.300 peserta yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM dan anggota komunitas lainnya.

Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa program GENCARKAN disiapkan sebagai upaya bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengorkestrasi gerakan secara nasional guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mahendra, program GENCARKAN juga mengacu pada hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024 yang diselenggarakan OJK bersama BPS yang menyebutkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia saat ini sebesar 75,02%, sementara itu indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%.

Selain itu, OJK juga melihat masih maraknya aktivitas keuangan ilegal dan judi *online* serta kelompok masyarakat rentan keuangan yang perlu mendapat perhatian khusus seperti kaum perempuan, pemuda dan pelajar, UMKM, masyarakat 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar), serta kelompok disabilitas dan pekerja migran Indonesia.

Untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang

semakin progresif serta untuk melindungi masyarakat, diperlukan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan mulai Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha jasa keuangan untuk berkolaborasi menjalankan GENCARKAN secara masif dan merata di seluruh daerah.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto yang juga bertindak selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menyampaikan bahwa GENCARKAN ini merupakan salah satu wujud nyata dari bentuk kolaborasi dan koordinasi pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Airlangga juga mengapresiasi inisiasi Otoritas Jasa Keuangan dalam membuat terobosan percepatan dan pemerataan literasi dan inklusi keuangan melalui program GENCARKAN.





Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyelenggaraan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2024 yang digelar mulai Januari hingga Februari 2024. Kerja sama OJK dan BPS pada pelaksanaan SNLIK 2024 ini diharapkan dapat memastikan proses persiapan, pendataan, hingga penghitungan hasil survei lebih terjaga kualitas dan akurasinya sehingga indeks yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia terkini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan penduduk Indonesia sebagai landasan program peningkatan literasi dan inklusi keuangan ke depan. Untuk pertama kalinya, SNLIK diselenggarakan OJK bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widayarsi Dewi menyampaikan substansi pelaksanaan SNLIK yang dilakukan bersama dengan BPS mengukur lima hal, yaitu pengetahuan, keterampilan, keyakinan,

sikap dan perilaku masyarakat terhadap produk layanan jasa keuangan. “Jadi dari survey ini kita bisa melihat bagaimana pemahaman masyarakat terhadap produk dan jasa” Kata Friderica.

Friderica mengapresiasi terjalannya kerja sama pelaksanaan survei dengan BPS. Kerja sama OJK dan BPS pada pelaksanaan SNLIK 2024 diharapkan dapat memastikan proses persiapan, pendataan, hingga penghitungan hasil survei lebih terjaga kualitas dan akurasinya sehingga indeks yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia terkini.

Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, BPS akan berkontribusi untuk bisa mengukur secara independen bagaimana literasi keuangan di Indonesia, karena tentunya program literasi keuangan merupakan program nasional yang harapannya dapat mendukung pelaksanaan SNLIK 2024.

Survei tersebut, menurutnya, dilakukan dengan tujuan menjadi bahan evaluasi bagi perumus kebijakan mengenai kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat, serta bagaimana program literasi dan inklusi keuangan dapat dirumuskan ke depan.

Dalam prosesnya, dilaksanakan pengawasan (*witnessing*) SNLIK yang bertujuan untuk memastikan pendataan survei dilakukan dengan baik dan benar oleh Petugas Pendata Lapangan (PPL). *Witnessing* juga dilakukan oleh seluruh kantor OJK di masing-masing wilayah provinsi guna menjaga kualitas proses pendataan SNLIK 2024.

Pendataan SNLIK 2024 dilaksanakan mulai tanggal 17 Januari hingga 5 Februari 2024 di 34 provinsi yang mencakup 120 kabupaten/kota, 8 wilayah KOJK, dengan jumlah Blok Sensus (BS) sebanyak 1.080.

Pendataan lapangan dilakukan oleh 374 Petugas Pendata Lapangan (PPL) dan 120 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) secara tatap muka dengan menggunakan aplikasi *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI). Masing-masing PPL dimaksud bertanggung jawab atas 2 sampai dengan 3 wilayah BS yang didampingi PML.

Sebelumnya, SNLIK dilakukan setiap tiga tahunan oleh OJK, dimulai dari tahun 2013 dan terakhir pada 2022. Survei tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk evaluasi sekaligus pemetaan terhadap kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.

Namun, menunjuk Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) diatur mengenai target

Pemerintah Daerah juga menyusun dan mengimplementasi program inklusi keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Keseluruhan rangkaian program ini bertujuan untuk membangun masyarakat Indonesia yang terliterasi, teredukasi, dan juga terlindungi.

Hasil SNLIK 2024

Hasil SNLIK tahun 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%. SNLIK tahun 2024 juga mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Hasil yang diperoleh menunjukkan indeks literasi keuangan syariah penduduk Indonesia sebesar 39,11%. Adapun, indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88%.

Penyampaian metodologi dan

“Jadi dari survei ini kita bisa melihat bagaimana pemahaman masyarakat terhadap produk dan jasa, kata Friderica.

inklusi keuangan Indonesia yang harus mencapai 90 persen pada 2024. Hal ini kemudian yang menjadi latar belakang OJK di tahun 2024 ini melakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan untuk mengetahui indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia pada tahun 2023.

Guna mencapai target dimaksud, OJK secara masif melakukan edukasi dan literasi keuangan bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, pembayaran, dan lain-lain. Selain itu, OJK bersama dengan

hasil SNLIK tahun 2024 disampaikan Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi di Kantor BPS, Jakarta.

Jumlah sampel SNLIK tahun 2024 sebanyak 10.800 responden yang berumur antara 15 s.d. 79 tahun. Metode sampling yang digunakan adalah *stratified multistage cluster sampling*:

- Pemilihan kabupaten/kota menggunakan PPS (*Probability Proportional to Size*)– *Systematic Sampling* dengan size jumlah



keluarga, dimana kabupaten/kota wilayah kantor OJK secara otomatis terpilih sebagai sampel.

- Pemilihan sejumlah blok sensus pada setiap kabupaten/kota terpilih menggunakan PPS–*Systematic Sampling* dengan *size* jumlah perkiraan rumah tangga dengan memperhatikan keterwakilan daerah perkotaan/perdesaan.
- Pemilihan sepuluh rumah tangga *eligible* pada setiap blok sensus dari hasil pemutakhiran menggunakan *Systematic Sampling* dengan *implicit stratification* berdasarkan tingkat pendidikan kepala rumah tangga.
- Pemilihan satu *eligible* responden umur 15-79 tahun pada rumah tangga sampel menggunakan *Random Sampling* dengan *implicit stratification* berdasarkan umur anggota rumah tangga *eligible*

menggunakan *Kish Table*.

SNLIK tahun 2024 menggunakan parameter literasi keuangan yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku, sementara indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan (*usage*) terhadap produk dan layanan 2 keuangan. Penggunaan parameter ini sesuai dengan indikator yang digunakan dalam OECD/INFE International Survey of Financial Literacy.

Berdasarkan gender, indeks literasi keuangan perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan indeks literasi keuangan laki-laki, yakni masing-masing sebesar 66,75% dan 64,14%. Indeks inklusi keuangan perempuan juga lebih tinggi dibandingkan dengan indeks inklusi keuangan laki-laki, yakni

masing-masing 76,08% dan 73,97%.

Berdasarkan klasifikasi desa, indeks literasi dan inklusi keuangan wilayah perkotaan masing-masing sebesar 69,71% dan 78,41%, lebih tinggi dibandingkan di wilayah perdesaan, yakni masing-masing sebesar 59,25% dan 70,13%. Berdasarkan umur, kelompok 26-35 tahun, 36-50 tahun, dan 18-25 tahun memiliki indeks literasi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 74,82%, 71,72%, dan 70,19%. Sebaliknya, kelompok umur 15-17 tahun dan 51-79 tahun memiliki indeks literasi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 51,70% dan 52,51%.

Selanjutnya, kelompok umur 26-35 tahun, 36-50 tahun, dan 18-25 tahun memiliki indeks inklusi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 84,28%, 81,51%, dan 79,21%. Sebaliknya, kelompok umur 15-17 tahun dan 51-79 tahun memiliki indeks inklusi keuangan terendah, yakni

”

Berdasarkan gender, indeks literasi keuangan perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan indeks literasi keuangan laki-laki, yakni masing-masing sebesar 66,75% dan 64,14%.

masing-masing sebesar 57,96% dan 63,53%.

Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, kelompok pendidikan tamat perguruan tinggi, tamat SMA/ sederajat, dan tamat SMP/ sederajat memiliki indeks literasi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 86,19%, 75,92%, dan 65,76%. Sebaliknya, kelompok pendidikan tidak/ belum pernah sekolah/ tidak tamat SD/ sederajat dan tamat SD/ sederajat memiliki indeks literasi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 38,19% dan 57,77%.

Selanjutnya, kelompok dengan pendidikan tamat perguruan tinggi, tamat SMA/ sederajat, dan tamat SMP/ sederajat memiliki indeks inklusi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 98,54%, 88,29%, dan 73,18%. Sebaliknya, kelompok dengan tingkat pendidikan tidak/ belum pernah sekolah/ tidak tamat SD/ sederajat dan

tamat SD/ sederajat memiliki indeks inklusi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 51,53% dan 62,58%. Dari data tersebut diperoleh informasi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka literasi dan inklusi keuangan juga semakin tinggi.

Berdasarkan pekerjaan/ kegiatan sehari-hari, kelompok pegawai/ profesional, pengusaha/ wiraswasta, dan ibu rumah tangga mempunyai indeks literasi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 83,22%, 78,32%, dan 64,44%. Sebaliknya, kelompok tidak/ belum bekerja, pelajar/ mahasiswa, dan pensiunan/ purnawirawan memiliki indeks literasi keuangan terendah masing-masing sebesar 42,18%, 56,42%, dan 57,55%.

Selanjutnya, kelompok pensiunan/ purnawirawan, pegawai/ profesional, dan pengusaha/ wiraswasta memiliki indeks inklusi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 98,18%, 95,04%, dan 85,40%. Sebaliknya,

kelompok tidak/ belum bekerja, petani/ peternak/ pekebun/ nelayan, dan pekerjaan lainnya memiliki indeks inklusi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 55,10%, 62,26%, dan 67,73%.

SNLIK tahun 2024 menjadi salah satu faktor utama bagi OJK dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan, strategi, dan merancang produk dan layanan keuangan yang sesuai kebutuhan dan kemampuan konsumen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk. Hasil SNLIK tahun 2024 menunjukkan segmen penduduk yang memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan yang lebih rendah dibandingkan tingkat nasional, yakni:

- Berdasarkan klasifikasi desa, yakni penduduk yang tinggal di perdesaan;
- Berdasarkan kelompok umur, yakni penduduk umur 15-17 tahun dan 51-79 tahun;
- Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, yakni penduduk dengan pendidikan rendah (tamat SD/ sederajat ke bawah);
- Berdasarkan pekerjaan/ kegiatan sehari-hari, yakni tidak/ belum bekerja, pelajar/ mahasiswa, petani/ peternak/ pekebun/ nelayan, dan pekerja selain pegawai/ profesional/ pengusaha/ wiraswasta/ pensiunan/ purnawirawan.

OJK akan semakin menggiatkan kegiatan literasi dan inklusi keuangan bagi kelompok tersebut. Fokus OJK untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan baik konvensional maupun syariah tertuang dalam Peta Jalan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (2023-2027).





Bedah Parameter Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2024, telah diumumkan. Indeks literasi dan inklusi keuangan dalam SNLIK merupakan representasi kondisi masyarakat Indonesia. Lantas bagaimana parameter perhitungan indeks literasi dan inklusi keuangan SNLIK Tahun 2024?

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2024 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%. Sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%. Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyebut capaian ini telah memenuhi



kriteria yang *well literate*.

Lalu bagaimana parameter SNLIK Tahun 2024? Sama dengan SNLIK tahun sebelumnya, terdapat 5 parameter yang digunakan untuk mengukur indeks literasi keuangan dalam SNLIK Tahun 2024 yaitu pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku. Seseorang akan dikatakan *well literate* apabila memenuhi 5 parameter tersebut. Sementara untuk mengukur indeks inklusi keuangan dalam SNLIK Tahun 2024 menggunakan parameter penggunaan (*usage*) terhadap produk dan/atau layanan keuangan. Seseorang dikatakan terinklusi apabila pernah menggunakan produk/layanan jasa keuangan. Parameter-parameter

tersebut selanjutnya, dijadikan acuan dalam penyusunan kuesioner survei dan pengolahan data hasil survei responden agar menghasilkan indeks literasi dan inklusi keuangan yang representatif.

Parameter Pengetahuan

Parameter ini digunakan untuk mengukur pemahaman masyarakat terhadap pengetahuan akan lembaga jasa keuangan formal, layanan produk formal, karakteristik produk, dan *delivery channel* dari berbagai sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan yang termasuk dalam pengukuran SNLIK meliputi sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, pergadaian, pembiayaan,

fintech, dan lembaga keuangan mikro baik yang menggunakan prinsip konvensional maupun syariah. Pengukuran SNLIK hanya mencakup lembaga jasa keuangan dan layanan produk formal, artinya produk/layanan jasa keuangan informal atau tidak berizin dari OJK seperti rentenir/praktik bank emok tidak masuk dalam perhitungan SNLIK.

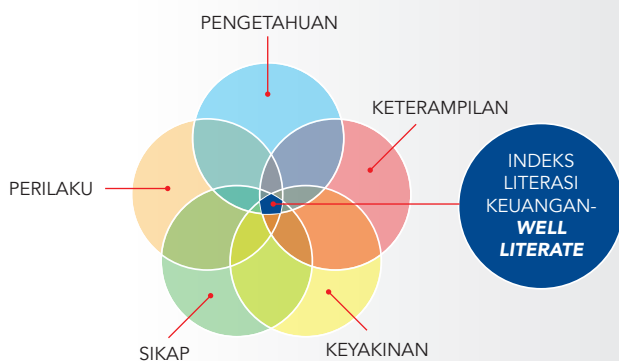
Dalam proses survei, enumerator akan menyampaikan beberapa pertanyaan seperti pengetahuan responden terhadap Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Selanjutnya, juga menanyakan pengetahuan masyarakat terhadap produk/layanan jasa keuangan formal. Tidak hanya itu, responden juga akan ditanyakan terkait

Sorotan **Utama II**

pemahaman responden terhadap karakteristik produk/ layanan jasa keuangan seperti manfaat, risiko, fitur, biaya, hak-kewajiban, serta cara mendapatkan produk/layanan keuangan.

Selain itu, responden juga ditanyakan pengetahuannya terhadap sarana pelayanan/*delivery channel* lembaga jasa

INDEKS LITERASI KEUANGAN



Kriteria **Well literate** akan terpenuhi apabila seseorang **memenuhi 5 parameter** indeks literasi keuangan, yaitu:

1. Pengetahuan
2. Keterampilan
3. Keyakinan
4. Sikap
5. Perilaku

keuangan, seperti kantor LJK, mesin ATM, EDC, layanan internet/*website*, layanan telepon/seluler, agen LJK, dan gerai pembayaran. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam mengenai tingkat pengetahuan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan.

Parameter Keterampilan

Parameter ini digunakan untuk mengukur keterampilan atau kecakapan/kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan. Dua keterampilan dasar yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan keuangan adalah kemampuan menghitung dan aritmatika sederhana. Kemampuan menghitung yang diukur dalam SNLIK Tahun 2024 terdiri dari enam aspek yaitu bunga, angsuran, hasil investasi, biaya penggunaan produk/layanan jasa keuangan, denda & inflasi. Dalam proses survei, enumerator akan menanyakan kemampuan responden dalam menghitung

keenam aspek tersebut serta menyelesaikan soal aritmatika sederhana. Contohnya soal aritmatika sederhana adalah cara membagi uang sebesar Rp100.000 secara sama rata untuk beberapa orang. Pertanyaan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keterampilan masyarakat dalam mengelola keuangan.

Parameter Keyakinan

Dua parameter sebelumnya mengukur pemahaman dan kemampuan masyarakat terkait literasi keuangan. Sementara itu, parameter keyakinan mengukur tingkat keyakinan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan formal baik konvensional maupun syariah serta kemampuan pengelolaan keuangan responden. Pertanyaan survei diantaranya mencakup keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan dan kemampuan dalam mengelola keuangan, untuk pertanyaan ini jawaban responden akan diukur dalam skala (1 : Sangat rendah; 2 : Rendah; 3 : Sedang; 4 : Tinggi; 5 : Sangat tinggi). Pertanyaan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keyakinan masyarakat pada lembaga jasa keuangan yang ada di Indonesia dan kemampuan mengelola keuangan pribadi.

Parameter Sikap

Parameter ini mengukur cara masyarakat menyikapi suatu



kondisi keuangan, pertanyaan mencakup jenis tujuan keuangan yang dimiliki oleh responden. Tujuan keuangan menjadi indikator dasar untuk mengukur sikap keuangan, oleh karena itu pertanyaan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kecenderungan sikap masyarakat terhadap suatu kondisi keuangan.

Parameter Perilaku

Parameter ini mengukur perilaku masyarakat dalam aspek keuangan. Pertanyaan survei meliputi cara mencapai tujuan keuangan responden. Pertanyaan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perilaku untuk mencapai tujuan keuangan ataupun menyelesaikan masalah kondisi keuangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Parameter Penggunaan (Usage)

Lima parameter sebelumnya digunakan untuk mengukur indeks literasi keuangan, sementara itu untuk mengukur

indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan/usage. Penghitungan indeks inklusi keuangan dari SNLIK Tahun 2024 diperoleh melalui penggunaan produk/layanan jasa keuangan. Dalam proses survei, enumerator akan menanyakan penggunaan produk/layanan jasa keuangan dari berbagai sektor. Pertanyaan survei meliputi penggunaan produk/lembaga jasa keuangan dalam satu tahun terakhir. Pertanyaan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat penggunaan produk/layanan jasa keuangan masyarakat Indonesia.

Itulah penjelasan mengenai parameter-parameter yang digunakan untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan dalam SNLIK Tahun 2024. Berbagai parameter yang digunakan tersebut telah melalui proses kajian dan juga telah mempertimbangkan rekomendasi OECD/INFE *International Survey of Financial Literacy*. Dengan demikian diharapkan SNLIK dapat merepresentasikan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.

PARAMETER INDEKS LITERASI KEUANGAN

PARAMETER LITERASI KEUANGAN	LABEL	PERTANYAAN
Pengetahuan	Pengetahuan LJK Formal (Konvensional-Syariah)	Apakah Anda mengetahui tentang Lembaga Jasa Keuangan (LJK) berikut?
	Pengetahuan Layanan Produk Formal (Konvensional-Syariah)	Di antara daftar produk dan layanan jasa keuangan di bawah ini, mana yang Anda ketahui?
	Pengetahuan Karakteristik Produk (Konvensional-Syariah)	Apakah Anda mengetahui karakteristik produk dan layanan jasa keuangan berikut ini?
	Pengetahuan <i>Delivery Channel</i>	Apakah Anda mengetahui tentang sarana pelayanan dari suatu produk dan/atau layanan jasa keuangan?
Keterampilan	Pernyataan Kemampuan Menghitung	Apakah Anda dapat menghitung Bunga, Angsuran, Hasil investasi, Biaya Penggunaan Produk/Layanan, Denda & Inflasi?
	Konsep Aritmatika Sederhana	Apabila 5 orang bersaudara diberi uang sebesar Rp100.000, dan mereka harus membagi uang tersebut sama rata, berapa jumlah uang yang diterima masing-masing?
Keyakinan	Keyakinan terhadap LJK Formal (Konvensional-Syariah)	Berdasarkan yang Anda ketahui, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) mana yang Anda yakini untuk aktivitas keuangan Anda?
	Keyakinan Kemampuan Pengelolaan Keuangan	Bagaimana kemampuan Anda dalam mengelola keuangan? (1:Sangat rendah; 2:Rendah; 3 :Sedang; 4:Tinggi; 5 : Sangat tinggi)
Sikap	Tujuan Keuangan	Apakah Anda memiliki tujuan pengelolaan keuangan?
Perilaku	Upaya Mencapai Tujuan Keuangan	Apabila memiliki tujuan keuangan, upaya apa yang Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut?

OJK Tingkatkan Literasi Keuangan Melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan



Mengapa literasi keuangan begitu penting? Jawabannya jelas, semakin tinggi tingkat literasi keuangan masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan. Imbasnya, melek keuangan akan menggerakkan perekonomian negara.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kapasitas perekonomian terbesar di dunia, bahkan beberapa lembaga internasional seperti *Pricewaterhouse Coopers (PWC)* memprediksi PDB Indonesia pada tahun 2030 menempati urutan kelima dari daftar negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Kondisi ini secara teoritis mempermudah usaha untuk mengakselerasi kemakmuran. Namun tantangan atas kondisi tersebut adalah bagaimana kemakmuran bisa dirasakan secara adil merata, sebagaimana tujuan bernegara adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Menggapai pertumbuhan ekonomi tinggi bukan hal yang sulit, cukup fokus pada sektor dan pelaku usaha tertentu terutama pada yang berskala besar maka kondisi tersebut dapat tercapai. Akan tetapi membuat pemerataan kue ekonomi pada masyarakat secara luas bukan hal mudah.

Pemerataan penyediaan akses layanan keuangan formal yang berkualitas dengan biaya terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat tersebut menjadi salah satu inisiatif yang harus terus didorong Pemerintah guna mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejak penetapan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada tahun 2016 tersebut, tingkat inklusi keuangan pun terus mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 3 poin persentase. Namun, dalam survei nasional 2022, OJK mengungkap fakta bahwa masih terjadi jurang yang besar antara provinsi dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan tertinggi dengan yang terendah. Untuk literasi keuangan, provinsi dengan indeks tertinggi dicapai oleh Provinsi Riau dengan 57,27% dan terendah adalah Provinsi Bengkulu sebesar 30,39%. Sementara untuk inklusi keuangan, Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan indeks tertinggi yakni 95,52% dan Provinsi Sulawesi Barat adalah provinsi dengan indeks inklusi keuangan terendah yakni 70,39%.

Jurang besar tersebut tidak lain disebabkan masih banyak masyarakat Indonesia yang baru sekadar mengakses jasa keuangan, namun belum betul-betul memahami cara kerja dan risikonya. Meski demikian, pada tahun 2023, tingkat inklusi keuangan di Indonesia tercatat sebesar 88,7%, atau lebih tinggi dari tahun 2022 yang sebesar 85,1%. Capaian tersebut juga lebih tinggi sebesar 0,7 poin persentase dari target yang

ditetapkan untuk tahun 2023 yakni sebesar 88%.

“Capaian ini merupakan hasil dari kolaborasi dan sinergi program yang kuat antara Kementerian, Bank Indonesia, OJK serta mitra pembangunan Pemerintah,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Meski tingkat inklusi keuangan telah menunjukkan pencapaian target secara nasional, namun pemerintah perlu mengambil langkah untuk memangkas berbagai tantangan ke depannya seperti pengurangan kesenjangan tingkat inklusi keuangan dengan tingkat literasi, pengurangan disparitas antar daerah dan antar kelompok sosial-ekonomi, optimalisasi kepemilikan rekening pada berbagai kelompok masyarakat, peningkatan literasi

digital, peningkatan perlindungan konsumen, penyediaan data keuangan inklusif yang terdisgregasi untuk kelompok-kelompok intervensi, hingga penguatan kelembagaan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Peningkatan keuangan inklusif nasional didorong dengan capaian tiga indikator utama berupa jangkauan akses, penggunaan produk keuangan, dan kualitas yang secara umum juga mengalami peningkatan signifikan. Hingga saat ini telah terdapat 53,9 juta rekening pelajar, 150,7 juta akun uang elektronik, dan 30 juta merchant QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*). Sementara itu, untuk program jaminan sosial terdapat 1,11 juta penyaluran Kartu Prakerja dan pembiayaan bersubsidi kepada



4,64 juta debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sedangkan, untuk menjangkau masyarakat di area perdesaan juga telah terdapat 1,18 juta agen Laku Pandai dan 932 ribu agen Layanan Keuangan Digital.

Pentingnya literasi keuangan di zaman serba digital seperti sekarang merupakan salah satu aspek yang wajib dimiliki siapa saja tanpa mengenal batasan usia. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan seseorang, maka tercapainya tujuan untuk melakukan perencanaan serta pemilihan produk dan jasa keuangan yang lebih baik juga akan semakin besar. Dengan begitu, kualitas hidup pun otomatis dapat meningkat.

Upaya OJK Dorong Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan

Pemerintah akan terus melakukan penajaman pelaksanaan SNKI tahun 2024, dengan target tingkat keuangan inklusif mencapai 90% dan target kepemilikan akun sebesar 80%. Selain itu, pemerintah juga telah mencanangkan target keuangan inklusif dan literasi keuangan untuk jangka menengah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029, dengan rincian target penggunaan akun yang diharapkan meningkat sebesar 1% tiap tahun mulai dari 91% di tahun 2025 hingga 95% pada tahun 2029, dan target kepemilikan akun yang

diharapkan meningkat sebanyak 2% per tahun mulai dari 82% di tahun 2025 hingga 90% pada tahun 2029.

"Pemerintah dengan melibatkan industri sektor keuangan dan mitra pembangunan juga telah merumuskan berbagai inisiatif program khususnya yang menyoal kelompok masyarakat yang belum terlayani oleh keuangan formal dalam rangka mencapai target inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun ini sesuai target dari Presiden RI selaku Ketua DNKI," tutur Menko Airlangga.

Di samping penentuan sejumlah target tersebut, OJK saat ini juga tengah merealisasikan program GENCARKAN dengan tema "Masyarakat Cerdas Keuangan Menuju Indonesia Emas 2045". Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa program GENCARKAN disiapkan sebagai upaya bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengorkestrasi gerakan secara nasional guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mahendra, program GENCARKAN juga mengacu pada hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024 yang diselenggarakan OJK bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

"Hasil SNLIK 2024 menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Kami meyakini bahwa penguatan keduanya adalah kunci untuk meningkatkan likuiditas dan pendalaman pasar, yang akan berdampak pada pengembangan sektor jasa keuangan, termasuk peningkatan penyaluran pembiayaan. Jika ini kita dorong terus maka memberikan daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Mahendra.

Selain itu, OJK juga melihat masih maraknya aktivitas keuangan ilegal dan judi online serta kelompok masyarakat rentan keuangan yang perlu mendapat perhatian khusus seperti kaum perempuan, pemuda dan pelajar, UMKM, masyarakat 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar), serta kelompok disabilitas dan pekerja migran Indonesia.

Untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang semakin progresif serta untuk melindungi masyarakat, diperlukan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pelaku usaha jasa keuangan untuk berkolaborasi menjalankan GENCARKAN secara masif dan merata di seluruh daerah.



Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan program GENCARKAN diharapkan dapat menjangkau seluruh kabupaten/kota dan menyasar seluruh kelompok prioritas dengan dukungan jaringan kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

“Program GENCARKAN juga mendorong lahirnya 2 juta duta dan agen literasi dan inklusi keuangan yang dapat memberikan *multiplier effect* melalui beragam kegiatan edukasi keuangan bagi masyarakat luas. Program GENCARKAN juga akan dilakukan secara multikanal sehingga diharapkan dapat menjangkau hingga 50 juta rakyat Indonesia,” papar Friderica.

Melalui program GENCARKAN, ditargetkan pada tahun 2025 sebanyak 90% pelajar Indonesia telah memiliki tabungan. Selanjutnya, melalui tabungan Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda), sebanyak 2,5 juta kelompok mahasiswa dan pemuda telah memiliki rekening. Mendorong pembukaan akses kredit UMKM melalui program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) sehingga dapat menjangkau 1,6 juta debitur; serta mengakselerasi penggunaan produk keuangan oleh 30% kelompok penyandang disabilitas.

Target lainnya di bawah payung program GENCARKAN ini, OJK mengharapkan warganet juga termasuk bagian dari kelompok yang melek keuangan melalui kampanye Warganet Cakap Keuangan. Selain warganet, OJK juga membidik organisasi kepanduan pramuka untuk menciptakan generasi yang memiliki keterampilan untuk menabung serta merencanakan dan mengelola keuangan dengan baik.

Selain itu, kaum perempuan pun

ikut menjadi sorotan OJK untuk dibekali ilmu keuangan melalui kampanye edukasi keuangan Bundaku. “Kita percaya bahwa seorang ibu yang terliterasi maka ia pasti akan mengedukasi anak-anaknya dan juga keluarganya untuk kemudian mereka menjadi melek keuangan dan dapat memanfaatkan produk dan jasa keuangan untuk meningkatkan kesejahteraannya,” kata Friderica.

Apresiasi Program Literasi dan Inklusi Keuangan

Dalam kegiatan pencaangan GENCARKAN, OJK juga memberikan apresiasi kepada pelaku usaha jasa keuangan maupun pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan dalam bentuk finansial. Berikut nama-nama penerima apresiasi yang diberikan OJK.

DAFTAR PENERIMA APRESIASI LITERACY AWARD

1. Kategori Bank Umum Teraktif : PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk
2. Kategori Manajer Investasi Teraktif : PT Trimegah Asset Management
3. Kategori Perusahaan Efek Teraktif : PT MNC Sekuritas
4. Kategori BPR Teraktif : PT BPR Hasamitra
5. Kategori Perusahaan Asuransi Teraktif : PT Asuransi Astra Buana
6. Kategori PUJK Syariah Teraktif : PT Bank Aceh Syariah
7. Kategori Program Literasi Keuangan Terbaik Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota:
 - Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 - Pemerintah Kabupaten Pasuruan
 - Pemerintah Kota Surabaya
8. Kategori Program Literasi Keuangan Terbaik
 - PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
 - PT Permodalan Madani
 - PT Pegadaian
 - PT Asuransi Allianz Life
9. Kategori Program Literasi Keuangan Syariah Terbaik: PT Bank BTPN Syariah, Tbk
10. Kategori SRO Teraktif: PT Bursa Efek Indonesia

PENERIMA APRESIASI SATU REKENING SATU PELAJAR (KEJAR) AWARD

1. Kategori Wilayah Implementasi KEJAR Terbaik
 - Tingkat Provinsi : Provinsi Kalimantan Barat
 - Tingkat Kabupaten/Kota : Kota Denpasar
2. Kategori Bank Teraktif Pelaksanaan Bank Goes To School Sekolah Luar Biasa: PT Bank Pembangunan Daerah Bali
3. Kategori Bank Teraktif Pelaksanaan Bank Goes To School: PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda)
4. Kategori Satuan Pendidikan Terbaik Implementasi KEJAR
 - Satuan Pendidikan Umum : SMK Negeri 4 Bandung Mitra Kerja Sama PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk
 - Satuan Pendidikan Agama : MI Negeri 1 Bondowoso Mitra Kerja Sama PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
5. Kategori Bank Implementasi KEJAR Terbaik
 - Bank BUMN : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
 - Bank Umum Konvensional : PT Bank Central Asia, Tbk
 - Bank Umum Syariah : PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
 - Bank Pembangunan Daerah : PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
 - Bank Perekonomian Rakyat : PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda)
6. Kategori Bank Pencapaian Terbaik dalam Rangka Hari Indonesia Menabung: PT Bank Mandiri (Persero), Tbk



Waspada Judi *Online* dan Dampak Bagi Negara

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mencatat kerugian negara mencapai USD 7-9 miliar atau sekitar Rp107-138 triliun per tahun (kurs Rp15.335 per dolar AS) akibat judi *online*. Padahal dana sebesar itu dapat dimanfaatkan untuk pendanaan investasi dan modal UMKM. Yuk, cegah judi *online* dan cari alternatif investasi yang aman.

Maraknya pengguna permainan judi *online* ini tidak terlepas dari penyalahgunaan pesatnya perkembangan teknologi. Tidak seperti permainan judi yang biasa dilakukan para elite atau poker di suatu tempat, judi *online* ini dapat dimainkan secara praktis di mana saja dan kapan saja.

Kemudahan itulah yang membuat masyarakat mudah terbuai oleh rayuan hadiah fantastis secara instan. Hal itu kemudian menjadi ancaman bagi lingkungan sosial, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah yang sangat rentan terjerumus ke dalam permainan tersebut. Dampak buruknya adalah kecanduan, kebangkrutan, terjerat pinjol demi judi *online*, dan lain-lain.

Selain berdampak buruk bagi pribadi, permainan judi *online* ini ternyata memiliki dampak negatif yang signifikan juga terhadap negara. Dampak besar yang dirasakan negara akibat judi *online* ini seperti hilangnya pendapatan negara hingga mengancam sektor perusahaan dan bisnis.

Dampak negatif lainnya ialah berpotensi meningkatkan tindakan penipuan dan kejahatan *online*. Tindakan tersebut tentunya akan sangat merugikan negara, terutama dalam hal pendapatan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sederhananya, perputaran perekonomian di masyarakat juga akan semakin terganggu, sehingga tingkat kesejahteraan juga akan terancam.

Berbagai dampak tersebut menandakan bahwa maraknya permainan judi *online* merupakan suatu masalah yang perlu ditangani secara serius. Presiden Jokowi juga sampai turun tangan dengan membentuk Satgas Judi *Online*. Guna meminimalkan berbagai kemungkinan tersebut terus terulang, Kominfo meminta semua lembaga aktif memberantas judi *online*. Tak hanya itu, OJK sebagai regulator sektor keuangan telah melakukan beberapa langkah untuk memberantas judi *online*. Langkah tersebut diantaranya adalah melakukan pemblokiran

rekening penampung judi *online* dari sistem keuangan.

Tidak hanya itu, konsumen jasa keuangan dan juga masyarakat juga perlu aktif melakukan upaya menghindari judi *online*. Dengan

kolaborasi dan peran aktif berbagai pihak, fenomena judi *online* di Indonesia diharapkan dapat diberantas.

5 Tips Menghindari Judi *Online*

Dikutip dari kominfo.go.id, Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring atau Satgas Judi *Online* melakukan tiga operasi hukum untuk mengatasi judi *online* di masyarakat. Yaitu pembekuan rekening, penindakan jual beli rekening, dan penindakan terhadap transaksi *game online* melalui *top up* di *minimarket*. Selain ketiga operasi tersebut, Kominfo juga akan menutup akses *Internet Service Provider* (ISP). Hal itu dilakukan agar *provider* di luar negeri tidak memberikan ruang untuk pemain judi *online* Indonesia.

Tips Menghindari Kecanduan Judi *Online*

1. Kenali Bahaya Judi *Online*
Masyarakat perlu tahu risiko bermain judi *online*. Judi dapat menyebabkan masalah keuangan, stres emosional, dan gangguan pada hubungan sosial. Menyadari dampak negatif judi *online* akan membantu seseorang berpikir dua kali apabila ingin bermain judi *online*.
2. Meningkatkan Kesadaran Diri
Seseorang yang memiliki kecenderungan ingin melakukan judi *online* perlu memahami terlebih dahulu alasan kenapa ingin berjudi. Dengan mengetahui motivasi di balik keinginan berjudi, dapat membantu seseorang mengelola dorongan tersebut dengan lebih baik. Selain itu, masyarakat juga perlu berhati-hati dengan modus jual beli rekening. Hal ini berisiko rekening Sobat disalahgunakan oleh oknum untuk melakukan transaksi judi *online*.
3. Menggunakan Teknologi
Selanjutnya, bisa menghindari judi *online* menggunakan teknologi yang ada. Manfaatkan fitur-fitur pengendalian diri pada perangkat dan *platform online*. Misalnya, aplikasi yang memblokir akses ke situs judi atau pengaturan pengingat untuk berhenti bermain.
4. Menghindari Iklan dan Promosi Judi
Selanjutnya, menghindari iklan dan promosi judi dengan cara memblokirnya di perangkat pribadi. Membatasi paparan terhadap godaan tersebut dapat mengurangi dorongan untuk berjudi.
5. Mencari Dukungan Sosial dan Mencari Bantuan Profesional
Apabila seseorang terlanjur melakukan kecanduan judi *online* atau sangat ingin melakukan judi *online*, carilah dukungan sosial. Coba membicarakan masalah dan mendapatkan perspektif orang lain untuk meneguhkan hati menjauhi judi.



Bahaya Tindakan Ilegal Jual Beli Rekening

Fenomena jual beli rekening terjadi di kalangan masyarakat, salah satu dampaknya adalah penyalahgunaan rekening untuk judi *online*. Apa saja bahaya dan risikonya? Dan bagaimana cara untuk menghindari modus jual beli rekening tersebut?

Berbagai penipuan *online* semakin marak terjadi. Modusnya pun kian beragam. Perkembangan saat ini ditemukan modus jual beli rekening bank secara *online*. Jual beli rekening yang dilakukan secara *online* melalui *e-commerce* / *marketplace* tertentu, merupakan tindakan ilegal yang merugikan nasabah si pemilik rekening.

Berawal dari modus penipuan *online* di mana si pelaku menggunakan rekening bank tertentu untuk meyakinkan calon korbannya. Namun pelaku pastilah tidak menggunakan rekening pribadinya, karena akan sangat mudah tertangkap pihak berwenang jika korban melaporkannya. Lalu bagaimana mereka bisa mendapatkan rekening tanpa

harus menggunakan nama aslinya? Jawabannya adalah jual beli rekening secara ilegal, karena ternyata mudah menemukan rekening yang dijual secara bebas di *e-commerce*.

Dibandingkan membuka sendiri dengan datang ke bank yang nilai setoran awalnya dianggap lebih mahal. Maka pelaku memilih membeli rekening, tentunya harga tersebut tidak sama dengan setoran pertama dan tidak perlu menggunakan identitas asli. Dengan rekening palsu itulah, pelaku bisa bebas melakukan tindakan ilegal menipu sebanyak-banyaknya orang.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentu sudah mengendus tindakan ilegal ini dengan memerintahkan bank untuk memblokir lebih dari 7.000 rekening yang digunakan dalam aktivitas ilegal, termasuk judi *online* (judol). OJK pun akan memberikan konsekuensi berat kepada para pelaku perjudian, baik itu bandar maupun fasilitator lainnya. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan mereka yang terlibat dalam aktivitas ilegal, seperti perjudian *online*, jual beli rekening akan diidentifikasi dan tercatat dalam daftar hitam alias *blacklist* Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Artinya, pelaku tidak dapat membuka rekening bank lagi.

“Kira-kira yang terberat yang bisa diterapkan yang paling terbaru dari kita tentu adalah semacam *blacklist* SLIK. Hal ini berarti kita tidak akan memperbolehkan lagi mungkin warga negara Indonesia yang main judi untuk membuka rekening bank di Indonesia,” kata Dian.

Setidaknya ada tiga hal yang membuat kejahatan finansial seperti ini makin masif. Masyarakat Indonesia masih banyak yang buta literasi keuangan, literasi digital, dan literasi *cyber crime* serta *cyber fraud*. Ketiganya saling memengaruhi, sehingga kejahatan finansial tumbuh subur.

Bahkan beberapa orang mungkin tidak menyadari bahwa keterlibatannya

dalam transaksi semacam itu adalah ilegal dan dapat berdampak buruk pada diri mereka sendiri dan orang lain. Tentang siapa yang sering menjual rekening bank, ini dapat bervariasi. Ada individu yang sengaja mencuri data pribadi orang lain untuk kemudian menjualnya. Ada juga kasus dimana orang-orang yang memiliki rekening bank yang tidak aktif atau tidak digunakan lagi, lalu menjualnya kepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan finansial.

Masyarakat perlu memahami bahaya jual beli rekening bank seperti rekening disalahgunakan untuk dana tampungan tindak kriminal seperti judi *online* atau pencucian uang. Pemilik rekening bisa ikut terseret dan dimintai pertanggungjawaban jika rekening disalahgunakan. Oleh karena itu, masyarakat perlu menyadari bahwa setiap transaksi keuangan di rekening adalah tanggung jawab pemilik rekening. Jangan sembarangan meminjamkan apalagi menjual rekening dan informasi pribadi ke orang lain agar terhindar persoalan hukum di kemudian hari.

Lantas bagaimana solusinya? Di negara-negara lain, seperti Tiongkok, Hong Kong, dan Singapura, kerja sama antara otoritas keuangan dan pihak-pihak penegak hukum menjadi kunci. Jadi, regulasi menegakkan integritas sektor keuangan yang dilakukan oleh OJK adalah langkah pengawasan yang baik. Upaya mitigasi yang dilakukan oleh bank untuk memblokir rekening-rekening yang dicurigai terdapat aktivitas ilegal juga sudah sesuai koridornya.

Selanjutnya, masyarakat perlu memahami bahaya jual beli rekening bank seperti rekening disalahgunakan untuk dana tampungan tindak kriminal seperti judi *online* atau pencucian uang. Pemilik rekening bisa ikut terseret dan dimintai pertanggungjawaban jika rekening disalahgunakan. Oleh karena itu, masyarakat perlu menyadari bahwa setiap transaksi keuangan di rekening adalah tanggung jawab pemilik rekening. Jangan sembarangan meminjamkan apalagi menjual rekening dan informasi pribadi ke orang lain agar terhindar perkara hukum di kemudian hari.



Atasi Inflasi dengan Investasi Obligasi FR

Salah satu kebijakan yang dapat ditempuh untuk mengatasi inflasi adalah dengan berinvestasi. Pilihan instrumen investasi pun sudah beragam, salah satunya obligasi FR.



Inflasi di Indonesia sampai akhir 2024 diprediksi akan mencapai 2,9%. Lebih tinggi ketimbang realisasi inflasi pada 2023 yang hanya sebesar 2,61% secara tahunan atau *year on year*. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, per Mei 2024 terjadi inflasi tahunan sebesar 2,84%. Angka inflasi yang terus berfluktuasi tentu saja berdampak nyata pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang akan menurun terutama masyarakat berpenghasilan tetap.

Sebagai informasi, inflasi adalah keadaan di mana uang yang kita miliki mengalami penurunan nilai yang menyebabkan harga barang atau jasa terus naik. Secara garis besar, inflasi disebabkan karena uang yang beredar

di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Salah satu kebijakan yang diambil untuk mengatasi inflasi adalah dengan berinvestasi. Lalu apakah investasi cukup efektif mengatasi inflasi?

Banyak strategi yang dapat kita tempuh untuk melindungi nilai uang terhadap inflasi. Tetapi kita harus mempertimbangkan semua strategi atau melakukan diversifikasi portofolio investasi agar dapat efektif. Salah satu instrumen investasi yang cukup aman untuk dipilih adalah obligasi Fixed Rate (FR). Ini adalah jenis investasi berupa surat utang.

Obligasi Negara Indonesia seri FR atau obligasi FR adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah

dalam jangka waktu tertentu dengan kupon tetap. Sama seperti Obligasi Negara Ritel (ORI), Surat Berharga Negara (SBN), dan sukuk (obligasi syariah) yang merupakan jenis obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah dan memberikan manfaat berupa penerimaan kupon yang dibayarkan secara reguler sampai waktu jatuh tempo. Bedanya pada ORI, SBN, dan sukuk kupon dibayarkan setiap bulan sekali sedangkan pada obligasi FR kupon dibayarkan setiap enam bulan sekali dengan nilai yang sama.

Perbedaan lainnya adalah jangka waktu, umumnya ORI, SBN, dan sukuk memiliki waktu jatuh tempo 1-5 tahun sehingga cocok untuk investasi jangka pendek dan menengah, sedangkan



obligasi FR adalah instrumen investasi jangka menengah dan panjang dengan waktu jatuh tempo berkisar antara 5-30 tahun. Sehingga produk ini bisa dimanfaatkan untuk menyimpan dana kebutuhan masa depan seperti dana pendidikan, dana pensiun, dan lainnya.

Meskipun waktu jatuh tempo Obligasi FR sangat panjang, Sobat tetap bisa menjual produk ini sebelum waktu jatuh tempo. Prinsipnya sama dengan jual beli saham, kita tetap akan mendapatkan hasil penjualan sesuai dengan nilai obligasi pada saat dijual. Jika menjual obligasi dengan harga jual di atas harga beli, sebagai investor kita akan mendapatkan potensi *capital gain*. Sebaliknya jika harga jual lebih rendah daripada harga beli maka

terdapat risiko *capital loss*.

Sama seperti instrumen investasi lainnya yang memiliki risiko, obligasi FR juga mengandung risiko. Calon investor wajib membaca dan memahami syarat dan ketentuan sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada obligasi ini. Di antaranya adalah risiko pasar (*market risk*) berupa potensi kerugian (*capital loss*) bagi investor karena fluktuasi kinerja pasar keuangan, seperti perubahan suku bunga, perubahan fundamental ekonomi dan kondisi politik yang tidak stabil.

Risiko wanprestasi (*default*) adalah risiko dimana investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada

saat produk investasi jatuh tempo pembayaran nilai kupon dan pokok. Mengingat produk ini dijamin oleh negara, obligasi FR memiliki risiko gagal bayar yang sangat rendah. Risiko likuiditas (*liquidity risk*) artinya investor tidak dapat melikuidasi produk investasi dalam waktu yang cepat pada harga yang wajar.

Untuk menghindari ketiga risiko ini, sebelum berinvestasi pastikan kita hanya menggunakan dana tidak terpakai dan telah memiliki dana darurat yang mencukupi. Perlu digarisbawahi, produk obligasi FR termasuk sebagai produk investasi dengan risiko moderat dan jangka investasi menengah sampai dengan panjang jadi sesuaikan dengan kebutuhan dan profil risiko kita.

OJK Rilis Peta Jalan untuk Perkuat Industri Dana Pensiun

Perkuat industri dana pensiun di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya untuk mengoptimalkan potensi pengelolaan dana pensiun dengan meluncurkan Peta Jalan (*Roadmap*) Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028.



Peta Jalan ini dirilis untuk mendorong industri dana pensiun menjadi lebih kuat, stabil, dan terpercaya, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui peluncuran peta jalan ini, OJK bersama seluruh *stakeholders* merespon berbagai isu strategis terkait industri dana pensiun untuk mewujudkan sektor ini tetap sehat dan kredibel, sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

“Ini bukan hanya sekedar dokumen, tapi merupakan komitmen bersama dari seluruh *stakeholders* di industri dana pensiun yang berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan sistem pensiun Indonesia yang lebih baik lagi,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono.

Lebih lanjut, Ogi menyebutkan penyusunan *roadmap* tersebut karena industri dana pensiun masih menghadapi beberapa tantangan salah satunya adalah adanya potensi risiko kenaikan dependensi rasio saat berakhirnya bonus demografi di 15-20 tahun mendatang.

“Dari perspektif masyarakat, industri ini menjadi sarana untuk konsumsi pada saat masyarakat tidak berada dalam usia produktif dan jika mengacu kepada istilah yang cukup familiar saat ini, yaitu *sandwich generation*. Kami meyakini bahwa dana pensiun merupakan salah satu solusi finansial untuk memutus rantai *sandwich generation*,” ujar Ogi.

Sementara itu terdapat tantangan



periode 2026-2027. Dalam tahap ini fokusnya kepada konsolidasi penyelenggaraan program pensiun sukarela, penerapan investasi berdasarkan profil risiko peserta, serta pembangunan sistem terintegrasi mengenai kepesertaan pensiun nasional. Terakhir, fase ketiga yakni *end state* di tahun 2028 adalah fase penyesuaian dan pertumbuhan. Fokus periode ini adalah optimalisasi jangkauan kepesertaan pada sektor informal dan individual. Selain itu, diharapkan adanya peningkatan peran dana pensiun dalam *sustainable finance*.

Harapannya telah terbentuk ekosistem sistem pensiun nasional yang lebih baik lagi dengan adanya peningkatan *replacement ratio*, peningkatan kepesertaan sektor informal, serta tercapainya target tingkat densitas dana pensiun," tutur Ogi.

dari sisi *demand* di industri dana pensiun, yakni tingkat literasi dan inklusi dana pensiun yang masih tergolong rendah. Apabila dikaitkan dengan struktur tenaga kerja Indonesia yang didominasi oleh tenaga kerja dari sektor informal, terdapat tantangan berupa akses dan spesifikasi program pensiun yang belum sepenuhnya kompatibel dengan karakteristik pekerja pada sektor informal.

Adapun, dari perspektif *supply*, industri dana pensiun dihadapkan kepada isu pada penyelenggaraan program pensiun itu sendiri, antara lain dari sisi infrastruktur dan kapabilitas dalam mengelola investasi serta kemampuan pemenuhan pendanaan dana pensiun oleh pemberi kerja khususnya pada program pensiun manfaat pasti. Karena itulah, peta

jalan ini menjadi begitu penting untuk memandu industri dana pensiun tetap dalam jalurnya.

Dalam peta jalan ini, OJK telah menyusun dalam tiga fase sinergi antara dana pensiun wajib dan dana pensiun sukarela. Fase pertama adalah fase penguatan fondasi pada periode 2024-2025, yang fokus kepada penguatan sumber daya manusia, perluasan akses melalui pemanfaatan teknologi, serta penerapan prinsip-prinsip pengelolaan dana pensiun yang baik. Di fase ini, akan diperkuat tiga *layer* pengawasan industri dana pensiun, percepatan transformasi digital program pensiun dan peningkatan program literasi serta inklusi keuangan terkait dana pensiun..

Fase kedua, mengonsolidasikan serta menciptakan momentum pada



ISFO 2024 Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat

Sebagai upaya meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah khususnya untuk segmen pelajar dan mahasiswa, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menginisiasi program ISFO. ISFO menjadi kompetisi keuangan syariah terbesar di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah bagi pelajar dan mahasiswa.

OJK menggelar pelaksanaan Indonesia Sharia Financial Olympiad (ISFO) 2024 atau Olimpiade Keuangan Syariah dengan tema “Sharia Smart Generation for Brighter Future” yang bertujuan untuk semakin mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di kalangan pelajar dan mahasiswa.

ISFO 2024 merupakan Olimpiade Nasional Keuangan Syariah yang diperuntukkan bagi siswa SMA/ sederajat serta mahasiswa dari seluruh wilayah Indonesia untuk mengasah kemampuan dan pengetahuannya mengenai keuangan syariah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi hadir dan membuka kegiatan *Kick-Off* ISFO 2024 di Jakarta.

Dalam acara yang diikuti ratusan pelajar dan mahasiswa secara *online*, Friderica menyampaikan bahwa





peningkatan literasi terhadap generasi muda penting dilakukan agar mereka mampu melakukan pengelolaan keuangan yang baik dengan memanfaatkan produk keuangan syariah, serta terhindar dari kejahatan finansial di era perkembangan digital yang pesat.

Friderica juga meminta para pelajar dan mahasiswa untuk tidak terjerat sikap *fear of missing out (fomo)*, *you only live once (yolo)* dan *fear of other's people's opinion (fopo)* yang berpotensi merugikan kondisi finansial seperti bisa terjerat kasus-kasus penipuan serta pinjol dan investasi ilegal.

"Yang menarik tahun ini adalah ada tambahan untuk inklusi (keuangan). Jadi tahun sebelumnya karena kita sudah mulai (ISFO) di tahun 2022 dan kita fokus di literasinya, jadi seperti

cerdas cermat tapi secara literasi (keuangan), tapi nanti kita juga akan ada inklusinya," kata Friderica.

Dalam acara peluncuran ISFO 2024 tersebut, Friderica menuturkan kegiatan inklusi keuangan tersebut yakni dengan mendorong para UMKM menggunakan produk jasa keuangan syariah.

Penyelenggaraan ISFO 2024 akan menjangkau putra-putri pelajar SMA/ sederajat dan mahasiswa setiap daerah melalui 35 jaringan kantor OJK yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Melalui penyelenggaraan ISFO 2024, diharapkan dapat meningkatkan *awareness* dan minat adik-adik pelajar dan mahasiswa dalam menggunakan produk/layanan keuangan syariah serta mewujudkan generasi muda yang cakap keuangan syariah.

Kegiatan *Kick-Off* ISFO 2024 turut disaksikan oleh perwakilan kementerian, lembaga, dan instansi mitra penyelenggara ISFO 2024 maupun target peserta dari seluruh Indonesia. Rangkaian kegiatan ISFO 2024 berlangsung dari Juni hingga Agustus 2024 dengan dua jenis kompetisi, yaitu Kompetisi Cerdas Cermat Keuangan Syariah dan Wirausaha Muda Syariah. Kompetisi cerdas cermat keuangan syariah merupakan kompetisi bagi pelajar tingkat SMA dan mahasiswa yang menguji pengetahuan seputar keuangan syariah. Kompetisi wirausaha muda syariah adalah kompetisi bagi mahasiswa yang memiliki ide strategis untuk mengembangkan serta memanfaatkan peluang usaha bagi kemajuan bisnisnya.

Panitia ISFO 2024 menyiapkan hadiah dengan total ratusan juta rupiah, *e-certificate* dan berbagai hadiah menarik lainnya. Seluruh informasi rangkaian kegiatan dan tata cara pendaftaran ISFO 2024 dapat diakses melalui kanal media sosial resmi OJK dan Sikapiuangmu.

Melalui kompetisi tersebut, mahasiswa berkesempatan untuk mendapatkan dukungan permodalan yang diberikan oleh OJK dan pelaku usaha jasa keuangan syariah.

Dengan mengikuti lomba tersebut, OJK mendorong para peserta untuk memanfaatkan sarana informasi dan platform digital edukasi yang dimiliki oleh OJK antara lain seperti *website* resmi OJK, *Learning Management System (LMS)* Edukasi Keuangan, dan *Minisite* Sikapiuangmu dengan beragam materi edukasi keuangan syariah yang ada di dalamnya.



Waspada Maraknya Modus Penipuan Digital

Kasus penipuan di ranah digital saat ini tengah marak di Indonesia. Berbagai jenis modus penipuan digital telah banyak menelan korban. Kenali jenis-jenis modus penipuan digital berikut agar kita dapat terhindar.

Dikutip dari laman Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengenai Riset Nasional "Penipuan Digital di Indonesia: Modus, Medium dan Rekomendasi yang dilakukan tahun lalu, masyarakat Indonesia ternyata sangat rentan menjadi target penipuan di jagat maya.

Mengapa masyarakat Indonesia sedemikian gampang terkecoh *hoaks*

dan misinformasi, terlibat dalam perundungan siber, serta menjadi target penipuan di dunia maya? Hal ini disebabkan karena tingkat literasi digital masyarakat kita sebesar 65,43% (dikutip dari laman Kominfo). Ditambah lagi dengan ganasnya aksi pelaku, yakni pihak yang kita sebut sebagai *fraudster*.

Umumnya *fraudster* akan melakukan modus penipuan

seperti salah transfer (*money mule*), jebakan mengisi *link* yang dikirim lewat SMS/email (*phishing*), atau berpura-pura menjadi kerabat dekat melalui sambungan telepon (*social engineering*).

Selain itu, *fraudster* juga biasa menggunakan modus mengirim *malware* ke gawai korban (*pharming*) atau menyadap pengguna internet di tempat publik (*sniffing*).



Kasus penipuan terkini diantaranya adalah modus penipuan yang mengakibatkan korban tercatat memiliki pinjaman pada *fintech* pendanaan bersama atau pinjaman *online* padahal korban tidak pernah mengajukan pinjaman. Modus penipuan ini bisa merugikan korban dalam hal finansial karena ditagih pinjaman, tercatat memiliki utang dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, bahkan bisa menimbulkan reputasi kredit atau kolektibilitas (kol) buruk.

Untuk mengatasi kian meningkatnya kasus penipuan digital, pemerintah telah menerbitkan regulasi yang mewajibkan penyelenggara sistem untuk memastikan sistemnya aman dan bertanggung jawab. Bahkan telah ditetapkan Undang-Undang (UU) Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang memastikan pelakunya tidak akan bisa lolos dari jeratan hukum. Kedepannya pemerintah pun akan terus memperbarui peraturan terkait

guna menekan ragam modus penipuan yang semakin canggih.

Meski demikian, kita sebagai pengguna dari sebuah sistem teknologi digital, diharapkan dapat memproteksi diri sendiri guna menghindari kejahatan dunia maya. Adapun berikut ini beberapa cara menghindari modus penipuan digital.

1. Jangan mudah untuk memberikan informasi seputar data pribadi seperti KTP/KK kepada orang lain.
2. Hindari transaksi internet *banking* menggunakan jaringan internet gratis yang mudah diakses orang banyak.
3. Tidak mengakses situs berisiko tinggi dengan berbagai konten tambahan, meliputi iklan, *game online*, hingga *pop-up window*.
4. Pastikan untuk mengakses alamat *website* dengan benar. Apabila menemukan hal-hal janggal, segera lapor kepada pihak bersangkutan melalui layanan pusat bantuan.
5. Ganti *password* secara berkala dan jangan pernah memberikan

password tersebut kepada orang lain.

6. Tidak membalas pesan yang meminta informasi pribadi, seperti PIN atau *password* dan jangan mengisi data pribadi pada tautan/ dokumen yang mencurigakan.
7. Segera *log out* sesaat setelah melakukan transaksi untuk menghindari penyalahgunaan akun oleh pihak lain.
8. Apabila menerima transfer dana tidak dikenal, verifikasi sumber dana melalui *contact center* resmi bank atau instansi terkait sumber dana tersebut. Hindari mentransfer balik dana ke pihak lain tanpa bukti yang akurat.
9. Cek mutasi rekening dan *email* secara berkala. Laporkan jika terdapat notifikasi pinjaman atau transaksi keuangan yang mencurigakan.
10. Berhati-hati dengan telepon dari pihak tidak dikenal yang meminta informasi pribadi.

Dinginnya Serangan Fenomena *Tech Winter* pada Ekosistem Teknologi

Sadarkah kita sejak akhir 2022 silam banyak perusahaan berbasis teknologi, terutama *startup*, gulung tikar? Kondisi tersebut masih berlangsung hingga kini. Konon disebabkan karena fenomena *tech winter*. Lalu apa itu *tech winter*?

Tech winter telah datang, fenomena ini merujuk pada periode penurunan investasi dan aktivitas *startup*, yang membawa dampak signifikan pada lanskap teknologi dan ekonomi global. *Tech winter*

mengakibatkan menurunnya tren aliran pendanaan *startup* digital di Asia hingga mencapai 60%.

Akibatnya, *startup* di tanah air kekurangan *cashflow* karena pendanaan dari investor yang merosot. Sehingga berdampak buruk bagi perkembangan perusahaan.

Perusahaan teknologi mengalami periode finansial yang sulit sehingga menyebabkan inovasi melambat. Bahkan, mereka yang tidak mampu lagi bersaing dengan *startup* baru akan mengalami kebangkrutan. Sederhananya, fenomena *tech winter* dapat diartikan sebagai kondisi dimana terjadi penurunan minat dan investasi dalam sektor teknologi.



Fenomena ini sangat ramai diperbincangkan karena berpotensi menimbulkan efek Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di lingkungan *startup* demi menjaga stabilitas perusahaan. Bagaimana di Indonesia dan seperti apa dampaknya?

Sebenarnya ada beberapa ciri yang menandakan kondisi *tech winter* sudah menyerang Indonesia dan tandanya pun mudah untuk dikenali. Ciri *tech winter* yang pertama adalah terjadinya pengurangan karyawan dalam suatu perusahaan. Sudah ada beberapa perusahaan *startup* yang memutuskan untuk melakukan PHK demi menjaga efisiensi bisnisnya. Terkadang ciri *tech winter* bukan hanya PHK saja tapi juga termasuk *hiring freeze* (pemberhentian sementara) untuk beberapa karyawan.

Kedua, adalah saat pertumbuhan bisnis kurang agresif dan cenderung mengalami kerugian. *Tech winter* ditandai saat tidak adanya angka pertumbuhan dalam kurun waktu tertentu yang sesuai harapan pada perusahaan. Hal itu membuat perusahaan menjadi kurang berkembang karena tidak memiliki sumber daya yang cukup.

Celakanya, fenomena *tech winter* ini bahkan belum dapat diprediksi kapan berakhir. Akibatnya, aktivitas penyertaan investasi yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura menjadi lebih konservatif, atau memilih berinvestasi pada perusahaan rintisan bidang teknologi atau *startup* yang benar-benar mempunyai kejelasan model bisnis dan rencana mencapai profit.

Perusahaan terdampak agaknya dapat menerapkan beberapa strategi yang efektif dan efisien untuk mengurangi hantaman keras fenomena *tech winter* ini. Antara lain dengan melakukan efisiensi karyawan namun dengan prinsip kehati-hatian yakni tetap mengikuti regulasi pemerintah;

fokus pada *employer branding*; dan memanfaatkan *agile* sebagai upaya menghindari risiko kerugian yang lebih besar.

Bagi karyawan/pekerja yang akhirnya terkena dampak efisiensi, bijaklah menghadapinya dan upayakan tidak panik. Berikut beberapa tips yang dapat kita terapkan agar tidak salah langkah.

3. Bila darurat sekali dan membutuhkan bantuan finansial, pastikan mengajukan pinjaman melalui lembaga jasa keuangan legal dan hindari meminjam dana pada rentenir atau pinjol ilegal meski sedang terdesak.
4. Atur ulang pola konsumtif kita dengan mengurangi pembelian barang atau produk yang kurang



1. Segera hitung aset yang kita miliki untuk keperluan jual atau gadai sebagai upaya menyeimbangkan finansial.
2. Tetap siapkan dana darurat untuk menghadapi situasi tidak menentu seperti gelombang PHK. Pastikan kita sudah membiasakan diri menabung dan berinvestasi sebagai bekal di kemudian hari ketika terjadi lagi hal yang mengguncang neraca keuangan kita.
- bermanfaat. Bijaklah menggunakan dana yang masih ada untuk keperluan urgensi.
5. Bila menerima pesangon, manfaatkan dengan bijak, hindari melakukan aktivitas konsumtif.
6. Semangatlah lagi untuk mencari peluang baru agar tidak terpuruk berlarut-larut.

BNI Dukung Program Literasi Keuangan OJK

Royke Tumilaar, Direktur Utama BNI



PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI meraih penghargaan Program Literasi Terbaik dalam Financial Literacy Award 2024 oleh OJK saat rangkaian acara pencanangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) di JIExpo Convention Centre and Theatre, 22 Agustus 2024. Lantas bagaimana tanggapan Royke Tumilaar selaku Direktur Utama BNI atas penghargaan ini, dan bagaimana komitmennya dalam mendukung program literasi keuangan yang dicanangkan OJK? Berikut petikan wawancaranya.

BNI meraih penghargaan Program Literasi Terbaik dalam Financial Literacy Award 2024 oleh OJK, Program yang diajukan BNI adalah “Ayo Menabung dengan Sampah”.

Apa yang mendasari BNI mengangkat bank sampah?

Jawab: Ayo menabung dengan Sampah merupakan salah satu program yang tercermin dalam pilar ketiga Keberlanjutan BNI yaitu “BNI untuk Lingkungan”. Dalam program ini, pengelolaan sampah dilakukan dengan melibatkan masyarakat dengan metode yang terukur. Melalui program Ayo Menabung dengan Sampah, masyarakat umum dan siswa diajak untuk memilah sampah,

menyetorkannya pada Bank Sampah, dan mengkonversikannya menjadi sejumlah uang yang dapat disimpan di Tabungan BNI. Program ini juga sebagai salah satu bentuk inklusivitas keuangan karena keberadaan bank sampah diperkuat dengan BNI Agen46 yang mampu menjangkau area yang sulit dijangkau oleh kantor fisik perbankan atau 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). BNI Agen46 hadir untuk memudahkan berbagai transaksi keuangan masyarakat seperti pembukaan rekening, tarik setor tunai, transfer, hingga pembayaran tagihan.

Apa dampaknya program ini bagi masyarakat?

Jawab:

Manfaat bagi Masyarakat/Nasabah:

- Edukasi Keuangan: Masyarakat memiliki budaya untuk menabung dan keterampilan dalam mengelola keuangan melalui pemanfaatan lingkungan.
- Ketersediaan Akses Layanan Perbankan: BNI Agen46 akan menjadi *entry point* pertama masyarakat untuk masuk ke bank, membuka rekening, dan aktif bertransaksi menggunakan rekening dalam kehidupan sehari-hari. BNI Agen46 juga menjadi sarana pertama untuk memasuki dunia digital pertama kali
- Pemberdayaan Ekonomi: Bagi masyarakat, sampah yang biasanya dianggap tidak bernilai dapat diubah menjadi pendapatan. Selanjutnya bagi Bank Sampah yang sudah terafiliasi dengan BNI Agen46 memperoleh tambahan pendapatan dari margin konversi harga sampah dan insentif transaksi.
- Kontribusi Lingkungan: Program ini mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan melalui pengelolaan sampah yang terukur dan bertanggung jawab.

Bagaimana hasil program Ayo Menabung dengan Sampah? Apakah sesuai harapan?

Jawab: Perjalanan program yang berkelanjutan, program ini telah berjalan selama 7 tahun sejak 2017 hingga 2024. Dengan dukungan 276 BNI agen46 yang tersebar yang tersebar di 22 Provinsi, 67 Kabupaten/Kota, 140 Kecamatan dan 206 Kelurahan, program “Ayo Menabung dengan Sampah” telah menunjukkan hasil yang sangat baik dan sesuai harapan. Salah satu indikator keberhasilan program ini adalah dianugerahkannya rekor MURI kepada BNI atas keberhasilan dalam mengimplementasikan program menabung dengan sampah yang dilakukan oleh 19.046 siswa dari 48 sekolah di Lombok Barat, dan beberapa indikator lainnya.

Bagaimana tanggapan Bapak atas kemenangan ini dan bagaimana bentuk dukungan BNI terhadap literasi keuangan?

Jawab: Kami sangat bangga dan bersyukur atas penghargaan Program Literasi Terbaik dalam Financial Literacy Award 2024 yang diberikan oleh OJK. Kemenangan ini merupakan bukti nyata komitmen dan kerja keras BNI dalam mendukung literasi keuangan di Indonesia. BNI berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan literasi dengan melakukan edukasi secara menyeluruh mulai dari level pemerintahan hingga level masyarakat. Pada level pemerintahan, BNI telah bekerja sama dengan lebih dari 100 Kota/Kabupaten dalam program *Smart City* dengan enam konsep utama *Smart People, Smart Governance, Smart Infrastructure, Smart Environment, Smart Economy* dan *Smart Society*. Pada level masyarakat, edukasi literasi dan inklusi keuangan dilakukan berbasis komunitas seperti program Ayo

Menabung dengan Sampah atau Bank Sampah dan program Simpanan Pelajar (Simpel). Saat ini, terdapat 276 Bank Sampah yang tersebar di 206 kelurahan di 22 provinsi di seluruh Indonesia.

Selain itu, edukasi berbasis komunitas juga dilakukan pada lingkungan kampus dengan memperkenalkan *Digital Banking* serta produk-produk investasi sebagai antisipasi keberadaan investasi ilegal dan judi *online* yang marak terjadi. Tidak hanya pada skala dalam negeri, BNI berkolaborasi dengan OJK juga aktif melakukan edukasi kepada diaspora, Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan memanfaatkan keberadaan Kantor Perwakilan BNI di luar negeri, seperti yang akhir-akhir ini dilakukan di Hong Kong, Tokyo dan Osaka. Terkini, program edukasi literasi keuangan diadakan bersama dengan OJK di Hunian Pekerja Konstruksi di IKN akan bahayanya judi *online*. Secara berkelanjutan, BNI berkomitmen untuk terus melanjutkan program-program tersebut yang telah direncanakan di seluruh Kantor Wilayah BNI bekerja sama dengan instansi serta *stakeholders* terkait menuju Masyarakat Cerdas Keuangan untuk Indonesia Emas 2045.

Terima kasih kepada OJK untuk penghargaan ini. BNI akan terus melanjutkan program yang berkelanjutan dan inovatif yang dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat secara masif, merata dan tepat sasaran.

Apa harapan BNI untuk masyarakat terkait literasi dan edukasi keuangan?

Jawab: Melalui kegiatan literasi dan edukasi keuangan yang berkelanjutan, BNI yakin bahwa masyarakat Indonesia akan memiliki ketahanan finansial yang lebih baik dan dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.



OJK Terbitkan POJK Baru tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi

OJK memberlakukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) baru Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi pada Oktober 2024 mendatang. POJK tersebut diterbitkan untuk mendukung dan memudahkan usaha perasuransian.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa mengatakan, penerbitan POJK 8 Tahun 2024 tersebut bertujuan untuk memperkuat dasar hukum dalam aspek tata kelola penyelenggaraan produk asuransi secara lebih baik.

“Melalui POJK 8 Tahun 2024, OJK berharap penyederhanaan proses persetujuan produk asuransi, penggunaan polis asuransi secara elektronik atau digital dan tata kelola perhitungan premi/kontribusi secara lebih hati-hati dapat

diimplementasikan dengan baik,” ujar Aman.

Penyempurnaan yang dilakukan antara lain mengenai jenis dan kriteria produk asuransi, penguatan ketentuan Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI), klausul polis asuransi, mekanisme perhitungan dan penetapan premi/kontribusi, mekanisme persetujuan dan pelaporan produk asuransi, penyelenggaraan produk asuransi secara digital, pemenuhan prinsip syariah, kajian atas pengembangan produk asuransi, pemantauan kinerja produk asuransi,

komite pengembangan produk asuransi, dan penghentian produk asuransi.

Proses penyusunan POJK Nomor 8 Tahun 2024 ini pun telah melibatkan para pemangku kepentingan atau *stakeholders* dan mempertimbangkan masukan dari industri perusahaan perasuransian secara seimbang. Selain itu, POJK 8 Tahun 2024 ini juga memberikan jangka waktu peralihan selama 6 bulan sejak tanggal POJK ini diundangkan, yakni 25 April 2024.

“Dengan demikian, POJK 8 Tahun 2024 berlaku efektif sejak tanggal 29 Oktober 2024 dan diharapkan pelaku usaha asuransi memiliki waktu yang cukup untuk melakukan persiapan agar POJK ini dapat diimplementasikan dengan efektif dan berdaya guna bagi perkembangan industri perasuransian,” kata Aman.

OJK berharap dengan penerbitan POJK 8 Tahun 2024 sebagai penyempurnaan dari POJK 23 Tahun 2015 akan membawa dampak yang besar dan positif bagi perkembangan industri perasuransian. Sehingga tercipta suatu ekosistem industri perasuransian yang lebih kuat dan sehat.

Adapun ketentuan yang diatur dalam POJK 8 Tahun 2024 diantaranya adalah:

Pertama: Penguatan pokok pengaturan mengenai penyelenggaraan PAYDI yang sebelumnya hanya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK).

Kedua: Penyederhanaan mekanisme persetujuan dan pelaporan produk asuransi.

Ketiga: Penguatan pengaturan

mengenai penyelenggaraan produk asuransi secara digital.

Keempat: Penambahan pengaturan pemenuhan prinsip syariah dalam setiap penyelenggaraan produk asuransi.

Kelima: Penguatan tata kelola penyelenggaraan produk asuransi khususnya dalam perhitungan premi/kontribusi dilakukan melalui tiga hal yakni perencanaan yang terstruktur dan jelas atas pengembangan dan pemasaran produk asuransi sebelum dipasarkan yang dicantumkan dalam rencana bisnis perusahaan; penyusunan kajian atau pengujian produk asuransi dalam setiap pengembangan produk asuransi; dan penguatan tugas, peran, dan tanggung jawab komite pengembangan produk asuransi, aktuaris perusahaan dan seluruh manajemen perusahaan yang terkait.





Franchise Salah Satu Pilihan Bisnis untuk Pemula

Bisnis *franchise* telah menjadi salah satu model bisnis yang populer bagi para pemula. Konsep bisnis ini menawarkan kesempatan untuk memulai usaha dengan memanfaatkan merek yang sudah dikenal dan sistem yang teruji.

Franchise adalah bentuk kerja sama bisnis di mana pemilik merek atau pemilik usaha yang sudah mapan, yang disebut sebagai "*franchisor*," memberikan hak kepada pihak lain, yang disebut "*franchisee*," untuk menggunakan merek dagang, model bisnis, dan dukungan operasional mereka dengan imbalan pembayaran tertentu.

Franchisee dapat mengoperasikan bisnis mereka sendiri dengan

mengadopsi konsep, produk, dan layanan yang telah diuji keberhasilannya oleh *franchisor*. Hal ini memungkinkan *franchisee* untuk memanfaatkan citra merek yang sudah dikenal dan mendapatkan dukungan dalam hal pelatihan, pemasaran, dan pengelolaan. Dengan adanya perjanjian *franchise*, kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan, dimana *franchisor* memperluas jangkauan bisnisnya

melalui *outlet* yang dimiliki oleh *franchisee*, sementara *franchisee* dapat membangun dan mengelola bisnis mereka dengan dukungan dari model yang sudah terbukti.

Franchise menawarkan beragam jenis bagi para wirausahawan yang ingin terlibat dalam sistem bisnis yang sudah teruji, seperti *franchise* makanan, ritel, pendidikan, dan sebagainya. Setiap jenis *franchise* memiliki karakteristik unik, sistem operasional, dan potensi keuntungan yang berbeda.

Keuntungan memiliki bisnis *franchise* bagi pemula, dengan sistem *franchise*, seorang pengusaha bisa memanfaatkan model bisnis yang sudah teruji dan terbukti sukses, serta mendapatkan dukungan dari pemilik merek atau perusahaan *franchisor*. Keuntungan memiliki bisnis *franchise* tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga memberikan peluang untuk pertumbuhan yang lebih cepat dan stabilitas operasional.

Mendapatkan modal untuk memulai bisnis *franchise* dapat

menjadi langkah yang krusial dalam mewujudkan impian memiliki usaha sendiri. Proses ini melibatkan pemahaman mendalam tentang opsi pembiayaan yang tersedia dan strategi yang efektif untuk mengumpulkan dana yang diperlukan. Dengan memahami berbagai pilihan ini, calon pengusaha dapat membuat keputusan yang cerdas dan merencanakan langkah-langkah yang tepat untuk mewujudkan impian bisnis *franchise* mereka.

1. Tabungan Pribadi

Tabungan pribadi dapat menjadi modal yang efektif untuk memulai bisnis *franchise*. Dengan disiplin dalam menabung, seseorang dapat secara konsisten mengumpulkan dana yang cukup untuk membuka usaha *franchise*.

2. Program Pembiayaan *Franchise*

Dalam program pembiayaan *franchise*, lembaga keuangan atau pihak yang menyediakan pembiayaan bekerja sama dengan *franchise* tertentu untuk memberikan pinjaman atau modal kepada para calon *franchisee*.

3. Kemitraan

Kemitraan dalam bisnis *franchise*, mencakup kerja sama antara *franchisor* dan pihak ketiga yang berminat untuk membuka dan mengelola unit *franchise* (*franchisee*). Pihak ketiga menyediakan modal yang diperlukan untuk membuka dan mengoperasikan bisnis, sedangkan *franchisor* menyediakan merek, dukungan operasional, dan panduan bisnis. Melalui kemitraan ini, modal yang diperoleh dari *franchisee* dapat digunakan untuk investasi awal, renovasi, atau perluasan usaha.

4. Investasi

Dengan berinvestasi dalam jenis instrumen keuangan seperti saham, obligasi, atau properti, seseorang dapat mengumpulkan dana yang cukup untuk membeli hak

franchise sebuah bisnis.

Keuntungan dari investasi ini dapat digunakan sebagai modal awal untuk membuka dan mengoperasikan *franchise* yang dipilih.

8 Ide Bisnis *Franchise* yang Murah dan Mudah

Berikut ide bisnis *franchise* yang mudah, murah, dan cepat balik modal. Mulai dari bisnis FnB, *laundry*, hingga *fashion*, semuanya bisa dicoba. Modal yang harus dikeluarkan pun terjangkau.

1. Bisnis FnB (*Food and Beverage*)

Ada banyak ide bisnis waralaba yang bisa dieksplor di sini, mulai dari *coffee shop*, restoran, *tea shop*, hingga *cafe*. Sejauh ini, industri FnB berpeluang menghasilkan keuntungan terbesar di Indonesia. Selain itu, jenis bisnis *franchise* ini selalu melakukan inovasi dari waktu ke waktu untuk beradaptasi dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

2. Bisnis *Laundry*

Bisnis *franchise* selanjutnya yang bisa dicoba adalah *franchise laundry*. Usaha ini terbukti sangat laku di kota besar, dimana rutinitas masyarakat yang sibuk seringkali membuat mereka tak punya waktu untuk mencuci pakaianya sendiri. Sangat penting untuk membangun bisnis *laundry* yang berorientasi pada pelayanan.

3. Bisnis *Fashion*

Bisnis *fashion* adalah jenis *franchise* yang selalu digemari oleh semua kalangan. Target konsumennya pun sangat luas, mulai dari perempuan, kaum milenial, laki-laki, hingga anak-anak. Yang terpenting, kita harus mempelajari tren pakaian dan produk yang tertarget supaya memiliki konsumen yang loyal. Apalagi, tren *fashion* termasuk cepat dan sering berubah-ubah dalam 1 hingga 2 bulan.

4. Bisnis Kurir Pengiriman

Ide bisnis *franchise* yang satu ini sedang berkembang pesat. Apalagi, sejak *platform e-commerce* makin ramai digunakan masyarakat, pastinya dibutuhkan makin banyak tenaga untuk mengirim barang. Nah saat ini, sejumlah perusahaan ekspedisi di Indonesia membuka kemitraan dengan berbagai skema. Salah satunya adalah sistem kemitraan full, dimana *franchisee* diharuskan menyediakan tempat khusus untuk difungsikan sebagai agen pengiriman.

5. Bisnis *Pet Shop*

Ide bisnis *franchise* selanjutnya yang menguntungkan adalah *franchise pet shop*. Bisnis ini sangat menjanjikan, terlebih makin banyak orang yang memelihara binatang peliharaan seperti anjing dan kucing.

6. Bisnis Minimarket

Perusahaan-perusahaan besar seperti Indomaret dan Alfamart mempersilahkan para pelaku usaha untuk menjadi mitra mereka.

7. Bisnis Pertamina

Franchise pom bensin mini menjadi salah satu jenis usaha yang makin ramai dan laris selain *franchise* makanan dan minuman.

Fears and Greed: Hindari Bias Psikologi Dalam Berinvestasi

Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi keputusan kita dalam berinvestasi. Salah satunya adalah faktor psikologis investor. Kenali 2 jenis bias psikologis yang seringkali menjerat investor pemula, pelajari bagaimana menghindari dan membuat keputusan investasi yang lebih cerdas.



Dunia investasi tidaklah mudah untuk diselami. Ada banyak hal yang harus kita pahami dan banyak tantangan yang perlu dihadapi. Jadi tidak hanya melihat imbal hasil yang akan diterima namun juga tantangan yang harus dilewati. Belum lagi selalu ada risiko yang harus siap dihadapi saat kita berinvestasi.

Selain modal, hal penting lain yang harus dimiliki oleh seorang investor adalah mental. Ternyata jika ingin terjun ke dunia investasi, kita wajib punya mental yang cukup kuat. Modal uang mungkin mudah untuk dimiliki, namun tidak dengan modal mental. Tidak semua orang bisa punya mental yang cukup kuat untuk menyelami dunia investasi.

Jika tidak punya mental yang kuat dan bagus, maka sulit bagi investor untuk mengambil keputusan investasi. Mungkin lebih mudah baginya untuk mengikuti investor lain. Bahkan bisa saja langkah investasinya hanya ikut-ikut tren yang sedang terjadi sekarang alias *fear of missing out* (FOMO).

Kondisi mental atau emosional investor sangat menentukan dalam mengambil keputusan berinvestasi, baik saat membeli atau menjual instrumen investasi. Dalam ilmu keuangan hal ini dikenal sebagai bias psikologi. Bias psikologi menggambarkan kondisi penyimpangan dalam pengambilan keputusan investasi karena mengutamakan emosional tanpa mempertimbangkan fakta yang ada.

Bias psikologi yang paling umum terjadi adalah *fears* atau *loss aversion bias* dan *greed bias*. *Fear* merupakan rasa takut dan hal ini sangat wajar dialami oleh manusia. *Mindset* ini membuat investor cenderung merasa takut untuk melangkah. Investor juga cenderung ingin menghindari penderitaan dalam dunia investasi yaitu kerugian. Bahkan ketakutan ini

bisa membuat seorang investor tidak bisa berpikir rasional. Contohnya investor yang tidak berani berinvestasi saham karena *high risk*, padahal risiko tinggi pada produk saham juga diikuti dengan potensi keuntungan yang bisa didapatkan apabila mampu menganalisis pasar saham dengan tepat.

Selanjutnya ada *greed bias*. *Greed*

mendorong saham gorengan dengan harapan mendapat imbal hasil yang tinggi. Investor yang serakah sangat mudah tergiur dengan kenaikan harga saham, padahal saham gorengan tidak memiliki fundamental yang baik dan berisiko rugi dalam jangka panjang. Contoh lainnya adalah kebiasaan menahan saham (*hold*) pada harga yang cukup tinggi tanpa



artinya serakah dan dalam dunia investasi hal ini sangat umum terjadi. Sifat serakah ini sebenarnya memang manusiawi. Bahkan ini menjadi teori umum bahwa seorang investor pasti ingin mendapatkan imbal hasil yang besar dari instrumen yang sudah diinvestasikan.

Mindset serakah ini muncul karena investor biasanya ingin cepat kaya dari hasil investasinya. Pada akhirnya malah membuat investor mengambil keputusan yang kurang realistis dan memicu kerugian. Niat awal ingin mendapat lebih banyak imbal hasil tapi malah harus menanggung kerugian yang besar. Contohnya, investor yang

mempertimbangkan risiko.

Lantas, bagaimana cara mengatasi *mindset fear* dan *greed* tersebut? Salah satunya cara adalah dengan mencari ilmu yang memadai tentang investasi. Pahami prinsip-prinsip investasi dengan baik; analisis produk investasi secara komprehensif dan objektif; kenali profil risiko dan tingkat toleransi risiko; susun dan terapkan rencana investasi; serta lakukan pengecekan dan penyesuaian (*rebalancing*) portofolio secara berkala. Dengan pengetahuan yang memadai tentang investasi akan membantu kita lebih tenang dan bijak dalam mengambil keputusan berinvestasi.

Aduan Konsumen Modus Investasi Bodong dan Judi *Online*

Berdasarkan data layanan dari Kontak OJK 157, periode Mei hingga Juli 2024, OJK menerima 53.418 layanan konsumen. Layanan tersebut terdiri dari 8.318 pengaduan dan 45.100 pertanyaan sektor perbankan, perasuransian, perusahaan pembiayaan, pasar modal, dan *fintech*.

Sebanyak 2.329 merupakan pengaduan bidang pinjaman *online* multiguna, 965 mengenai pembayaran angsuran multiguna, dan 747 mengenai kartu pembiayaan. Sebanyak 18.293 pertanyaan mengenai produk pinjaman *online* multiguna, 6.035 pertanyaan mengenai pembayaran angsuran multiguna, dan 3.346 pertanyaan mengenai transfer dana.

OJK juga mencatat laporan mengenai investasi bodong dan judi *online*. Konsumen melaporkan modus investasi melalui aplikasi Telegram dan sampai saat ini data tersebut tidak kembali. Ada pula modus penipuan investasi bodong pada trading yang ada di internet. Konsumen juga menyampaikan penipuan melalui *link* di aplikasi media sosial dan *e-commerce* seperti aplikasi egram, dan lain-lain.

Sehingga konsumen mengalami kerugian materi dimana aliran dana tersebut masuk dalam dana judi *online* di luar negeri. Ada pula konsumen yang menyampaikan permintaan untuk melakukan pembukaan pemblokiran rekening tabungannya karena judi *online* dan konsumen tidak merasa pernah melakukan kegiatan tersebut namun hanya pernah meminjamkan KTP kepada temannya. Kasus lainnya, yakni penagihan pinjaman *fintech* yang belum jatuh tempo tetapi penagih mengancam akan menggunakan data nasabah untuk judi *online*.

Berdasarkan data di atas, OJK akan terus melakukan tindakan perlindungan konsumen melalui langkah preventif, maupun kuratif. Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) di kontak157.ojk.go.id, Whatsapp 081157157157 dan email konsumen@ojk.go.id. OJK juga akan terus melakukan edukasi kepada masyarakat pengguna jasa keuangan untuk lebih cermat dan teliti dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Cara ini terus dilakukan agar konsumen di Indonesia terlindungi dengan baik.

Data Layanan dan Kontak OJK Data Pengaduan Tahun 2023 Periode 1 Mei – 31 Juli 2024



Raih Berkah Wakaf Melalui *Cash Waqf Linked Deposit*

Satu kebaikan kecil, bisa memberikan manfaat besar untuk orang lain. Salah satu caranya dengan berwakaf melalui program *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD). Apa itu CWLD?

Secara sederhana wakaf diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Misalnya, untuk membangun sekolah atau fasilitas publik lainnya dengan tujuan memberdayakan umat. Dalam hal ini seluruh pengelolaan sekolah dikeluarkan dari dana pribadi dan ditujukan untuk masyarakat umum.

Dana pribadi kita dapat disalurkan melalui perbankan syariah dalam program *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD). CWLD adalah produk wakaf uang temporer yang dirancang untuk mengintegrasikan fungsi sosial dengan fungsi komersial bank syariah sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Mekanisme produk ini mirip instrumen deposito pada umumnya. Nasabah atau Wakif akan melakukan penyetoran dana wakaf tunai ke bank dalam bentuk deposito.

Selanjutnya bank akan mengelola deposito tersebut sesuai dengan jangka waktu dan perjanjian



deposito. Sebagaimana produk deposito lain, setelah jatuh tempo, dana wakaf uang dikembalikan kepada wakif (orang yang memberi wakaf/nasabah). Yang membedakan dengan deposito pada umumnya, dana bagi hasil deposito akan disalurkan kepada penerima manfaat wakaf (*mauquralast*) melalui *nazhir* (pengelola aset wakaf) yang telah menjadi rekanan Bank Syariah LKS-PWU. Artinya nasabah tidak menerima keuntungan bagi hasil deposito, melainkan mendapatkan pahala dari wakaf yang telah disalurkan.

Lalu bagaimana penyaluran dana wakaf ini dalam CWLD? Dana wakaf akan disalurkan melalui *Nazhir* dalam bentuk program wakaf yang bermanfaat bagi umat. Program tersebut meliputi beberapa bidang seperti kesehatan, pendidikan, UMKM, rumah ibadah, peternakan, pertanian, air/sumur, dan lain-lain. Contoh pemanfaatan program wakaf di bidang kesehatan adalah pembangunan rumah sakit yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan memanfaatkan produk CWLD, kita berkesempatan untuk berkontribusi dalam pemberdayaan umat.

Keunggulan dari CWLD ditinjau dari sisi LKS-PWU dapat dilihat dari potensi Dana Pihak ketiga (DPK) atas deposito wakaf dan potensi DPK pengendapan dana dari *nazhir*; potensi pendapatan dari sisi pembiayaan dengan *close-loop*; meningkatkan reputasi Bank Syariah terkait pelaksanaan fungsi sosial; pemberdayaan komunitas dan keuangan berkelanjutan; serta potensi nasabah baru bagi Bank Syariah.

Dari sisi wakif dalam CWLD akan mendapatkan SWU (sertifikat wakaf uang), AIW (akta ikrar wakaf) dan bilyet CWLD. Pokok deposito akan kembali setelah periode wakaf temporer berakhir. Nasabah ikut berkontribusi



pada peningkatan kesejahteraan sosial dan pengelolaan dana wakaf pada kegiatan/aktivitas perbankan syariah.

Sedangkan bagi *nazhir* sendiri akan memberikan kemudahan dalam pemasaran dengan memanfaatkan layanan digital LKS-PWU; dana wakaf dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) jika dana wakaf memenuhi ketentuan di bawah Rp2 miliar; mendapatkan manfaat atas aset setelah proyek selesai; dan nilai manfaat untuk *mauquf alaih* (umat) lebih optimal; serta kemudahan dalam penyaluran nilai manfaat.

Berikut ilustrasi CWLD melalui kerja sama *nazhir* wakaf tanah dan *nazhir*

wakaf uang dalam pembangunan gedung rumah sakit atau sekolah di atas tanah wakaf. *Nazhir* mempunyai tanah wakaf yang akan dikembangkan dengan pembangunan gedung untuk tujuan komersial, misalnya gedung sekolah atau rumah sakit. Lalu, *nazhir* tanah wakaf tersebut dapat bekerja sama dengan *nazhir* wakaf uang untuk penghimpunan dana CWLD. *Nazhir* kerja sama dengan Bank syariah sebagai LKS-PWU menyusun program wakaf uang untuk pembangunan gedung tersebut termasuk pembiayaan yang diperlukan.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024

HASIL SNLIK TAHUN 2024

Inklusi Keuangan lebih tinggi daripada Literasi Keuangan, terutama pada sektor konvensional



Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Hasil survei ini menjadi landasan program OJK dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan ke depan.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) merupakan survei berskala nasional yang diselenggarakan oleh OJK untuk memetakan keadaan terkini dari tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Pelaksanaan lapangan SNLIK tahun 2024 dilakukan mulai 9 Januari hingga 5 Februari 2024 di 34 provinsi yang mencakup 120 kabupaten/kota termasuk 8 wilayah kantor OJK (1.080 blok sensus). Jumlah sampel SNLIK tahun 2024 sebanyak 10.800 responden yang berumur antara 15 s.d. 79 tahun.

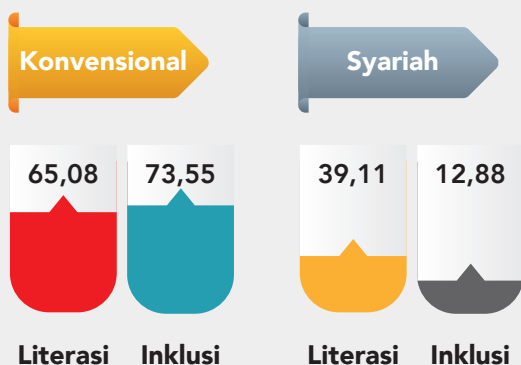
SNLIK tahun 2024 menggunakan parameter literasi keuangan yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku, sementara indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan (*usage*) terhadap produk dan layanan keuangan.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, hasil SNLIK 2024 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan penduduk Indonesia mencapai 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 75,02%.

Survei tahun ini juga mencakup tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Hasilnya menunjukkan indeks literasi keuangan syariah sebesar 39,11%, dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88%.

Hasil SNLIK 2024 menjadi faktor utama bagi OJK dan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan, strategi, serta merancang produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Indeks Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Tahun 2024 (persen)



OJK Genjot Inklusi Keuangan Lewat Program Satu Rekening Satu Disabilitas

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menegaskan pentingnya peningkatan akses keuangan bagi penyandang disabilitas. Untuk itu, OJK genjot inklusi keuangan ke penyandang disabilitas melalui Program Satu Rekening Satu Disabilitas. Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses produk keuangan bagi penyandang disabilitas.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa OJK telah menerima masukan dari Komnas Disabilitas mengenai tantangan yang

dihadapi penyandang disabilitas dalam mengakses layanan keuangan.

“Saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas seringkali menghadapi kendala besar untuk

mendapatkan layanan keuangan dasar. Bagi mereka, hal ini tidak hanya sulit tetapi juga menjadi suatu bentuk kemewahan yang sulit dicapai tanpa adanya kebijakan afirmatif,” ujar Friderica dalam acara ‘Edukasi Keuangan Difabel’, di kantor Kabupaten Toba, Medan pada Jumat 9 Agustus 2024.

Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa kebijakan afirmatif yang diluncurkan oleh OJK bertujuan



untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat menikmati akses keuangan yang setara. Data terbaru menunjukkan bahwa hanya 22% dari penyandang disabilitas yang memiliki rekening di lembaga keuangan, sementara 78% lainnya masih kesulitan.

Selain itu, ia berharap dengan program terbaru dari OJK, “Tuntas: Satu Rekening, Satu Disabilitas,” diharapkan dapat mengatasi kesenjangan ini. Program ini dirancang untuk memberikan akses yang lebih luas kepada penyandang disabilitas, dengan tujuan memastikan bahwa mereka dapat membuka rekening dan menggunakan layanan keuangan secara efektif.

Serta, ia juga menekankan pentingnya pendidikan dan

literasi keuangan dalam upaya ini. Menurutnya, OJK berkomitmen untuk memberikan edukasi yang memadai kepada masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, agar mereka lebih memahami dan dapat memanfaatkan layanan keuangan yang tersedia.

Dalam konteks ini, OJK juga telah memperkuat peraturannya melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini mengatur kewajiban lembaga keuangan untuk menyediakan akses dan kemudahan bagi penyandang disabilitas, serta memastikan perlindungan hak-hak mereka.

OJK akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga keuangan, untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan akses keuangan bagi penyandang disabilitas dapat semakin diperluas dan

disederhanakan.

“Langkah ini adalah bagian dari upaya kami untuk memastikan inklusi keuangan bagi semua lapisan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa setiap individu, tanpa

memandang kondisi fisik mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan,” tandasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, secara resmi membuka pelaksanaan Sosialisasi Satu Rekening Satu Disabilitas yang diadakan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Garut di Gedung Pendopo, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Selasa 16 Juli 2024.

Nurdin Yana menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kolaborasi antara TPAKD Kabupaten Garut dan OJK Tasikmalaya. Ia menegaskan, program Satu Rekening Satu Disabilitas akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya penyandang disabilitas di Kabupaten Garut.

Lebih lanjut, Nurdin menjelaskan bahwa program ini ditargetkan untuk sekitar 100 penyandang disabilitas. Ia berharap, program ini menjadi peluang bagi mereka untuk lebih mandiri dan berdaya.

Dalam Sosialisasi Satu Rekening Satu Disabilitas Kabupaten Garut, OJK mengundang para penyandang disabilitas sebagai salah satu target sosialisasi. Mereka diberikan pemahaman mengenai OJK, serta diingatkan tentang aktivitas keuangan ilegal seperti pinjaman *online* ilegal, judi *online*, dan bank emok (pinjaman rentenir di pasar tradisional).



Untung Rugi Kenaikan Limit Pinjol Jadi Rp10 Miliar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini tengah mengkaji wacana aturan terbaru terkait jumlah batasan pinjaman *fintech peer to peer (P2P) lending* atau pinjaman *online* (pinjol), yang tertuang dalam aturan RPOJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).



Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman mengatakan regulasi terkait jumlah batasan pinjaman *online* itu nantinya akan memasukkan batas pinjaman hingga Rp10 Miliar dari sebelumnya yang hanya mencapai Rp2 miliar.

Namun, dia menggarisbawahi jika pinjaman tersebut dikhususkan untuk pinjaman pendanaan produktif, bukan konsumtif. Beleid itu kini juga sedang dalam penyelarasan.

Pendanaan produktif adalah pendanaan untuk usaha yang menghasilkan barang/ jasa, termasuk usaha yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi penerima dana, berdasarkan waktu yang dijanjikan.

Sementara itu, pendanaan konsumtif diperlukan oleh penerima dana untuk pemakaian atau konsumsi saja, bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.

Selain itu, lanjut Agusman, pemberian pinjaman tersebut juga ditujukan berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria itu diantaranya yakni memiliki rasio TWP90 (tingkat risiko pinjaman macet 90 hari) maksimum sebesar 5%. Kemudian, penerima pinjaman juga tidak sedang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya dari OJK. "Melalui penyesuaian besaran maksimum pendanaan produktif itu, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pendanaan produktif oleh penyelenggara LPBBTI," kata Agusman.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengungkapkan untung dan rugi rencana OJK menaikkan plafon pinjaman *online* (pinjol) hingga Rp10 miliar dari sebelumnya hanya Rp2 miliar.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar menyampaikan, pihaknya selaku organisasi yang mewadahi pelaku usaha *fintech peer to peer (P2P) lending* sebagai penyedia layanan pinjol mengapresiasi usulan OJK terkait kenaikan plafon pinjol tersebut. Menurutnya, aturan ini akan menguntungkan sektor produktif yang dalam hal ini adalah para pelaku usaha seperti UMKM.

Di samping itu, Entjik menyampaikan, masih terdapat masyarakat yang khawatir terhadap dampak peningkatan limit pinjaman bagi sektor produktif ini. Mereka menganggap kebijakan limit pinjaman Rp10 miliar nantinya akan lebih banyak menimbulkan mudarat atau kerugian.

Dia menambahkan, walaupun pendanaan yang diberikan kepada UMKM ini sifatnya *online*, tetapi analisa kreditnya tetap dilakukan secara *hybrid (online dan offline)*. Artinya, *fintech p2p lending* hanya akan memberikan pinjaman *online* dalam jumlah besar kepada pihak-pihak yang dianggap mampu dan layak.

Lebih lanjut, AFPI sendiri akan ikut mengawasi kegiatan *fintech p2p lending*, di samping pengawasan dari OJK. Entjik menuturkan, pihaknya akan terlibat memberikan edukasi berupa diskusi, *coaching* dan *training* kepada para *platform* pinjol terkait manajemen risiko.

Dengan wacana kenaikan limit pinjol menjadi Rp10 miliar, konsumen hendaknya lebih bijak dalam memanfaatkan pinjol untuk berutang. Berikut beberapa tips mengelola utang produktif dengan bijak:

- **Atur pengeluaran bulananmu**
Ketika mendapatkan pinjaman produktif, maka harus digunakan untuk modal usaha. Atur pengeluaran pribadi agar tidak menggunakan modal usaha. Lalu, sisihkan pendapatan usaha untuk membayar cicilan utang secara disiplin.
- **Berhematlah!**
Di masa angsuran pinjaman, ada baiknya kamu lebih ekstra berhemat. Dengan berhemat, selain dapat membayar kewajiban tepat waktu, kamu juga dapat menyisihkan pendapatan usaha untuk dijadikan modal tambahan. Sehingga usaha semakin berkembang.
- **Kelola pendapatan ekstramu untuk melunasi utang**
Jika kamu mendapatkan omzet tambahan atau insentif tahunan dari perusahaan, Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan cuti, gunakan segera untuk melunasi pinjamanmu.

Itulah beberapa tips terkait mengelola utang produktif. Penting sekali bagi konsumen untuk bijak dalam mengelola utang sehingga wacana limit pinjol Rp10 miliar tidak menjadi bumerang bagi kondisi keuangan konsumen.

Buku Saku Perempuan Cerdas Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Ikatan Istri Pegawai OJK mempersembahkan buku saku Perempuan Cerdas Keuangan. Buku ini dirancang untuk memberikan panduan praktis dan strategi yang dapat membantu perempuan dalam mengelola keuangan dengan lebih efektif.



Peran perempuan dalam mengelola keuangan keluarga sering kali tidak terlihat, namun dampaknya sangat besar. Perempuan adalah pengelola anggaran rumah tangga, penentu prioritas pengeluaran, dan perencana masa depan. Oleh karena itu, penting bagi perempuan untuk memiliki pengetahuan yang cukup tentang perencanaan keuangan, agar dapat membuat keputusan yang tepat dan bijaksana.

Buku saku Perempuan Cerdas Keuangan ini disusun dan disajikan oleh OJK sebagai panduan bagi perempuan untuk menambah wawasan tentang pengelolaan keuangan yang sederhana, mengenal produk dan layanan jasa keuangan yang dibutuhkan oleh pribadi maupun keluarga, serta memahami aspek perlindungan konsumen keuangan. Buku saku ini juga dirancang untuk memberikan panduan praktis dan strategi yang dapat membantu perempuan dalam mengelola keuangan dengan lebih efektif. Mulai dari mengatur anggaran, menabung, berinvestasi, hingga mempersiapkan dana pensiun.

Semua topik ini dibahas dengan bahasa yang mudah dipahami dan contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selain memberikan panduan teknis, buku ini juga bertujuan untuk memberdayakan perempuan agar lebih percaya diri dalam mengambil keputusan finansial.

Harapannya, buku ini dapat memberikan manfaat bagi perempuan Indonesia, baik sebagai individu maupun sebagai ibu. Anak yang tumbuh cerdas berasal dari ibu yang cerdas. Mari bersama-sama tingkatkan literasi keuangan untuk menciptakan generasi cerdas keuangan menuju Indonesia Emas.



Pasangkanlah dengan memberi garis penghubung produk keuangan berikut ini dengan lembaga jasa keuangan yang paling sesuai.

Lembaga Jasa Keuangan

Produk Keuangan

Bank



Program Pensiun Manfaat Pasti

Asuransi



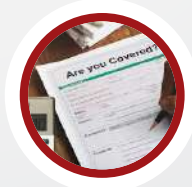
Pinjaman *Online*

Pasar modal



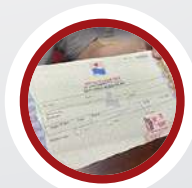
Gadai Emas

Dana Pensiun



Polis

Fintech



Deposito

Pegadaian



Saham

Pasangkanlah dengan memberi garis penghubung produk keuangan di atas dan unggah melalui Instagram Story. Jangan lupa mention @Sikapiuangmu

Dapatkan hadiah menarik bagi 3 orang pemenang kuis!

Tradisi Menabung dari Masa ke Masa

Menabung adalah dasar pengelolaan keuangan. Dengan menabung setidaknya kita dapat menjaga kestabilan finansial kita di tengah kian meningkatnya kebutuhan. Seperti apa tradisi menabung masyarakat Indonesia dari masa ke masa?



nationalgeographic.gridi.id

Menanamkan budaya menabung pada generasi masa kini semakin penting pasca masa pandemi Covid-19 yang memporakporandakan finansial setiap orang. Selain untuk menghadapi kemajuan ekosistem keuangan saat

ini, menabung merupakan salah satu budaya adiluhung bangsa Indonesia yang mengakar sejak zaman Majapahit.

Masyarakat Kerajaan Majapahit dari abad 13 hingga 16 Masehi sudah memiliki tradisi menabung. Tak hanya menyisihkan uang di celengan, mereka

juga menyimpan bahan pangan di bangunan semacam lumbung untuk mengatur kebutuhan. Artefak celengan banyak ditemukan di Trowulan, Kabupaten Mojokerto, kawasan yang diyakini sebagai ibu kota Majapahit.

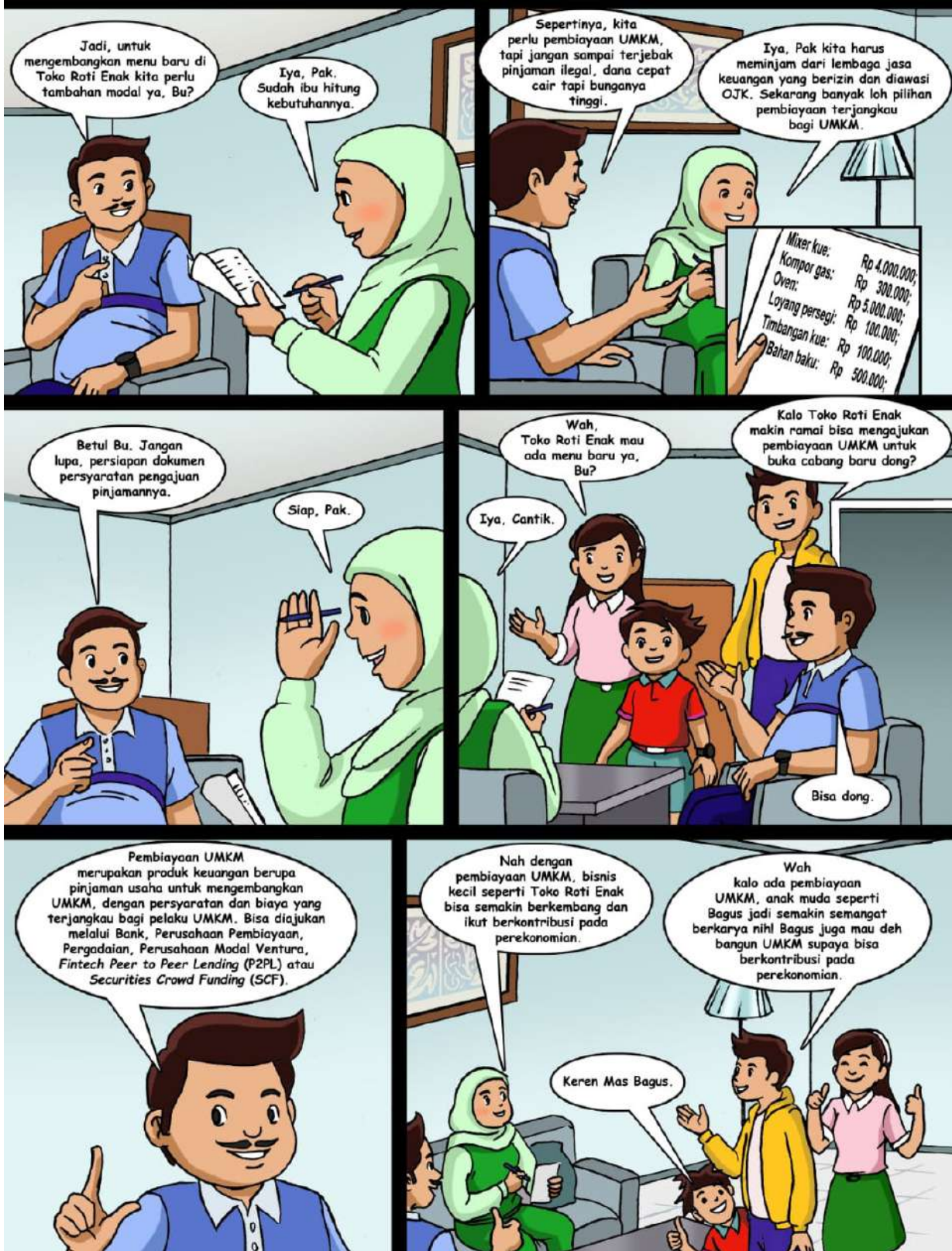
Seiring berjalannya waktu, tradisi menabung di celengan kini mulai tergeser. Hal itu menyusul dengan adanya perkembangan zaman. Masyarakat mulai mengenal tradisi menabung secara modern atau melalui lembaga perbankan sejak diperkenalkan oleh orang-orang barat. Pada abad ke 20, seorang priyayi asal Purwokerto menginisiasi untuk membentuk lembaga perbankan pertama yang menjadi cikal bakal Bank Rakyat Indonesia. Kemudian, menyusul berdiri lembaga bank lainnya. Semakin banyak lembaga perbankan yang muncul saat itu menandakan masyarakat mulai tertarik untuk menabung di bank.

Selain menabung uang di bank, masyarakat juga telah menerapkan menabung emas sejak 2000 tahun lalu. Tren menabung emas saat ini atau lebih dikenal dengan sebutan investasi emas telah diterapkan di banyak lembaga atau dapat disimpan sendiri. Masyarakat menilai menabung emas sangat cocok karena dapat disimpan dalam waktu yang sangat lama.

Bentuk investasi lainnya yang juga mulai diminati adalah investasi saham yang merupakan tren menabung masa kini. Masyarakat dapat menyimpan dananya lewat perusahaan-perusahaan sekuritas atau broker. Hingga kini bentuk dan cara menabung kian beragam.

Pentingnya menabung untuk menjaga kestabilan finansial akhirnya resmi digalakkan melalui gerakan "Ayo Menabung" berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang dikeluarkan pada tanggal 1 September 2016. Gerakan ini mengajak masyarakat untuk membangkitkan kembali budaya menabung dan investasi.

Tips Pembiayaan UMKM





DIGITON

OJK

**DIGITAL CREATIVE
COMPETITION**

GERAKAN NASIONAL CERDAS KEUANGAN

Short Movie

Video Animasi

Short Video

Yuk Ikuti
Lombanya
Menangkan

Total Hadiah

Rp **91** Juta

Periode *Submit Karya*

29 Agustus – 14 Oktober 2024

Info lengkapnya kunjungi kanal dibawah ini: